

**Solid & Solutif**

No. 3 Vol. 5/Oktober 2015

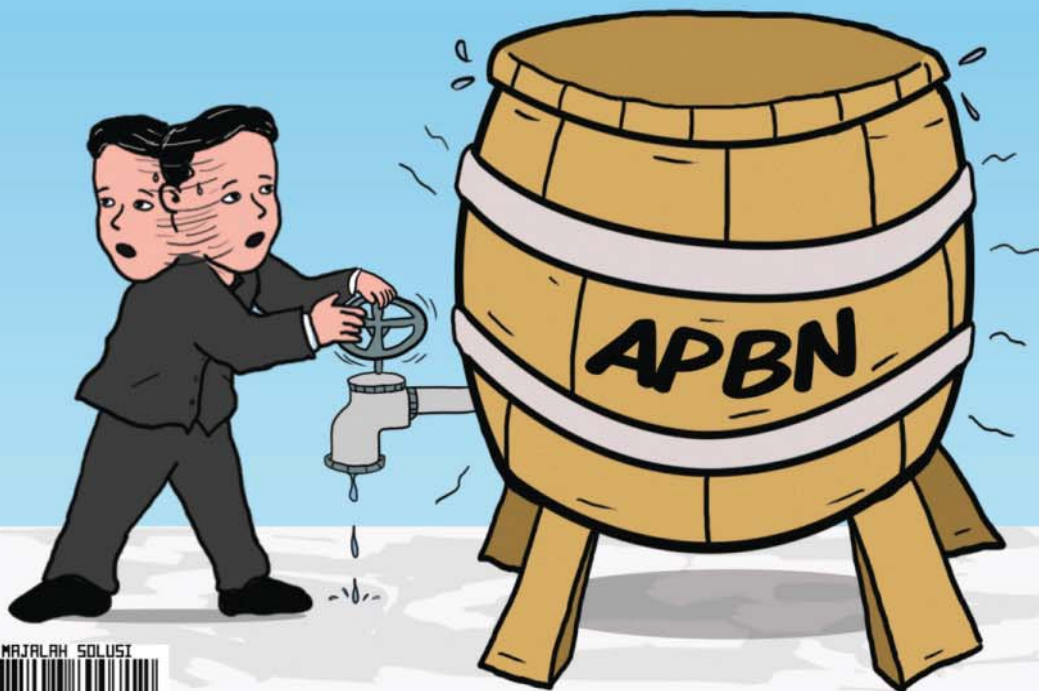
# SOLUSI

ISSN : 2088 - 0073

Majalah Pengawasan Kementerian Perindustrian

## Penyerapan Anggaran Mengapa Lamban ?

Membaca **Arah Kebijakan**  
Industri Otomotif





# Penyerapan Anggaran

Sampai Agustus 2015 serapan APBN tahun anggaran 2015 ternyata masih rendah, berkisar pada angka 40 persen dari pagu yang tersedia dalam DIPA. Jumlah tersebut tentu memprihatinkan, apalagi kondisi perekonomian yang tengah melambat dewasa ini. Bagaimana pun, daya serap anggaran pemerintah merupakan satu unsur penopang dalam menggerakkan roda perekonomian.

Banyak hal yang menyebabkan rendahnya daya serap anggaran tersebut. Ada faktor proses perubahan nomenklatur kementerian, keterlambatan penyelenggaraan lelang pengadaan barang/jasa, kompetensi pengelolaan perbendaharaan; bahkan juga kehati-hatian pengelola anggaran yang demikian tinggi sampai-sampai boleh dikatakan telah mencapai tingkat "ketakutan", mengingat maraknya kasus tindak pidana korupsi yang disidik aparat penegak hukum belakangan ini.

Memperhatikan fenomena tersebut maka Majalah Pengawasan SOLUSI kali ini mengangkat tema tentang "Lambannya Penyerapan Anggaran dan Ketakutan Aparat" sebagai tema laporan utama. Selain laporan utama yang berkaitan dengan pengawasan,

kami juga menyajikan laporan khusus seputar sektor industri. Kali ini kami mengulas tentang arah kebijakan industri otomotif sebagai salah satu sektor industri yang menjanjikan. Seperti diketahui pasar untuk industri otomotif masih terbuka dan menarik bagi investor.

Untuk penerbitan kali ini, kota Surabaya agaknya mendapat tempat istimewa. Ada tiga liputan yang kami lakukan di "Kota Buaya" ini. Pertama, liputan khusus tentang Pameran Produksi Indonesia (PPI) 2015 pada awal Agustus lalu. Kemudian kedua, kami menyajikan liputan tentang Balai Diklat Industri (BDI), Surabaya yang agak kewalahan memenuhi permintaan pelaku usaha industri garmen untuk merekrut SDM industri hasil didikan BDI Surabaya. Hal ini dikarenakan jumlah permintaan yang tinggi, dan itu merupakan salah satu indikator keberhasilan sistem pendidikan dan pelatihan yang dijalaninya. Dan ketiga, kami sajikan liputan tentang perusahaan industri *loudspeaker* terbesar di Asia Tenggara, yang lokasi usahanya ada di Surabaya.

Akhirnya, untuk Anda semua kami ucapkan selamat membaca.

Edwardsyah Nurdin

## Mari Kita Semua Menghemat Penggunaan BBM



# SOLUSI

Majalah Pengawasan

**Pelindung**

Ir. Syarif Hidayat, MM  
Plt. Inspektur Jenderal

**Pemimpin Umum**

Ir. Arus Gunawan  
Sekretaris Itjen

**Penanggungjawab**

Drs. Kris Widiarso, MA  
Inspektur IV

**Dewan Pembina**

Inspektur I  
Inspektur II  
Inspektur III

**Pemimpin Redaksi**

Drs. Singgih Budiono

**Dewan Redaksi**

Ir. Liliek Widodo, M.Si  
Yulia Astuti, ST  
Primertiningsih, SE, MM  
Edwardsyah Nurdin, BSc  
Trinanti Sulamit, S.I.Kom  
Dyan Garneta Paramita Sari, M.Sc

**Editor**

Ciendy Martha Gayatri, ST  
Deny Chandra, S.Kom  
Hariadi Amri, SH  
, ST

**Desain Grafis**

Arga Mahendra, SH

**Fotografer**

Y.L. Didid Kristiawan, ST

**Tenaga Sekretariat**

H. Abdul Somad

**Alamat Redaksi**

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian  
Jl. Gatot Subroto Kav. 52-53 Lt. 4 Jakarta Selatan  
Telp: 021-5251108  
Email: solusi@kemenperin.go.id



Majalah Pengawasan **SOLUSI**  
Terbit Per Triwulan

Redaksi menerima tulisan berupa opini / saran / kritik / komentar / foto ke alamat E-mail redaksi : [solusi@kemenperin.go.id](mailto:solusi@kemenperin.go.id)



Majalah Pengawasan SOLUSI versi pdf diunduh dari [www.kemenperin.go.id/majalah/10/majalah-solusi](http://www.kemenperin.go.id/majalah/10/majalah-solusi)

Diterbitkan oleh:  
Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian



**Aktual**



**8**

**Penyerapan Anggaran Lamban dan Ketakutan Aparat**

**Garis Bawah**



**20**

**Reshuffle Kabinet, Penyerapan Anggaran dan Setahun Pemerintahan Jokowi - JK**

**Kabar Industri**



**25**

**Membaca Arah Kebijakan Industri Otomotif**

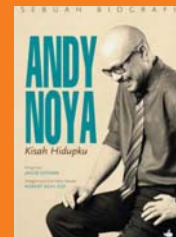
**Lebih Dekat dengan Auditi**



**38**

**BDI Surabaya: Mencetak SDM Industri Elektronika, Telematika dan Produk Tekstil**

**Inspirasi**



**42**

**Mengali Inspirasi dari : Kisah Perjuangan Andy Noya**

**Telaah**



**46**

**Menekan Fraud Lewat Budaya Organisasi**



# Upaya Pelemahan KPK Sangat Disayangkan

Oleh : Edy Waspan  
Inspektur II – Inspektorat Jenderal Kemenperin

Awal Oktober lalu, tepatnya pada tanggal 6 Oktober 2015, 45 orang wakil rakyat kita di Senayan telah mengajukan usul inisiatif RUU Perubahan atas Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ke dalam daftar program legislasi nasional tahun ini. Dalam draf revisi tersebut, ada beberapa pasal yang dinilai kontroversial dan mendapat sorotan publik.

Pasal-pasal yang menuai kontroversial itu adalah, pasal 5 tentang masa kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyatakan bahwa KPK dibentuk untuk masa 12 tahun setelah draf RUU diundangkan. Merujuk pada pasal ini berarti 12 tahun setelah itu maka KPK akan

bubar dengan sendirinya. Selanjutnya, pasal 7 menyebutkan bahwa KPK melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus korupsi dan/atau yang ditangani oleh kepolisian atau kejaksaan mengalami hambatan karena campur tangan kekuasaan, baik eksekutif, yudikatif, atau legislatif. Ini berarti KPK tidak berwenang lagi melakukan penuntutan.

Pada pasal 13 disebutkan bahwa KPK hanya berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi terhadap kasus yang merugikan negara paling sedikit Rp 50 miliar, sedangkan untuk nilai di bawahnya wajib diserahkan kepada kepolisian dan kejaksaan. Di

samping itu wewenang melakukan penyadapan dan perekaman terkait tindak pidana korupsi harus terlebih dahulu ditemukan bukti permulaan yang cukup dengan izin ketua pengadilan negeri. Draft ini tertuang dalam pasal 14 ayat (1) huruf a. Sementara pada pasal 53 ayat (1) menyebutkan bahwa KPK tidak lagi memiliki Penuntut karena Penuntut adalah jaksa di bawah Kejaksaan Agung yang tunduk pada Undang-Undang Kejaksaan dan diberi kewenangan menghentikan penanganan perkara.

Isi dari pasal-pasal sebagaimana disebutkan di atas tampak jelas memangkas kewenangan KPK dalam aktivitasnya menangani dan memberantas korupsi. Upaya pelemahan KPK sebenarnya telah berlangsung lama namun selalu kandas karena publik banyak yang membela dan membentengi KPK. Tidak jelas apa alasan sebagian orang berupaya untuk melemahkan kewenangan – bahkan nantinya membubarkan – KPK tersebut. Padahal kehadiran KPK justru dibidani oleh para wakil rakyat pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri sebagai pengejawantahan amanat reformasi yang menginginkan Indonesia bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Boleh jadi keinginan untuk membubarkan KPK itu didasarkan pemikiran bahwa KPK adalah lembaga *ad-hoc* yang keberadaannya dibatasi oleh waktu tertentu; di samping kekhawatiran KPK akan menjadi lembaga *super-body* dan karena itu harus dibatasi kewenangannya. Jika itu dasar pemikirannya, baiknya kita renungkan tentang keadaan negeri kita dewasa ini yang - jujur harus dikatakan - masih banyak terjadi penyimpangan

Data Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dikeluarkan oleh *Transparency International* menunjukkan bahwa pada tahun 2014 skor IPK Indonesia adalah 34 (dari angka 0 untuk nilai terendah sampai dengan 100 untuk nilai tertinggi), menempati urutan 117 dari 175 negara. Ini menunjukkan bahwa praktik korupsi di Indonesia masih tinggi bahkan pun bila dibandingkan dengan

negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Praktik korupsi yang masih tinggi itu jelas merupakan hambatan terbesar bagi pembangunan ekonomi dan sosial di suatu negara. Korupsi juga menyebabkan turunnya kualitas terhadap layanan publik dan terenggutnya hak-hak dasar warga negara.

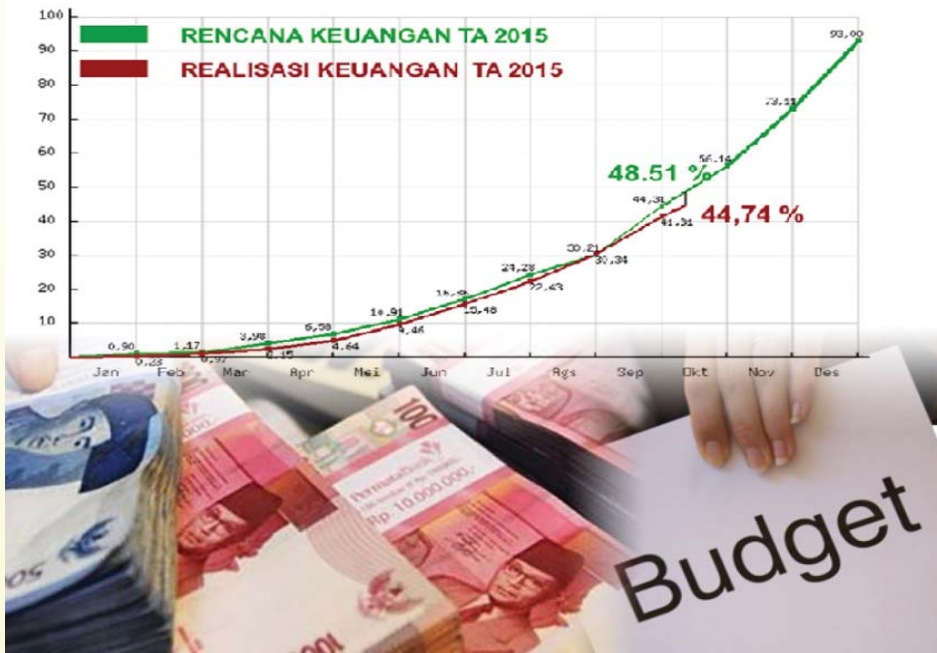
Dampak buruk dari praktik korupsi adalah rusaknya prinsip-prinsip dasar dari pengelolaan keuangan negara, terjadinya degradasi moral dan etos kerja serta hilangnya kepercayaan investor. Pada titik kulminasinya korupsi dapat membahayakan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain korupsi dapat digolongkan sebagai kejahatan luar biasa sehingga penanganannya pun harus dilakukan secara luar biasa pula.

Dalam menjalankan perannya sebagai pemberantas korupsi, harus diakui bahwa KPK telah menjalankan fungsi dan wewenangnya secara *on the track*. Itulah sebabnya lembaga anti-rasuah ini mendapat simpati dan kepercayaan publik yang tinggi. Tiap kali ada upaya menyerang atau melemahkan KPK, publik ramai-ramai membela KPK. Pembelaan terhadap KPK itu menunjukkan sikap masyarakat luas yang sudah muak dengan praktik korupsi di tanah air tercinta ini.

Itulah sebabnya sangat disayangkan apabila masih ada pihak-pihak yang seharusnya menyuarakan aspirasi rakyat, masih juga berupaya melemahkan dan bahkan berupaya meniadakan KPK. Bagaimana pun, kita masih membutuhkan KPK beserta aparat penegak hukum lainnya seperti kejaksaan dan kepolisian, untuk saling bersinergi bahu membahu memberantas korupsi.

Akhirnya, kita menyambut dengan gembira karena pemerintahan Jokowi – JK bersikap arif, sepatutnya untuk menunda pembahasan RUU tentang KPK tersebut. Adalah langkah yang tepat untuk lebih fokus terhadap pembangunan ekonomi, sosial dan budaya terlebih dahulu.





## Penyerapan Anggaran Lamban dan Ketakutan Aparat

*Pada saat perekonomian dunia bergerak lambat dan perekonomian Indonesia mau tak mau terdampak, belanja pemerintah diharapkan dapat menggeliatkan pasar dan memberikan efek multiplier. Sayangnya, sampai semester II tahun anggaran hampir berjalan, angka realisasi anggaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah masih rendah.*

Realisasi belanja negara per-akhir Juli 2015 berdasarkan data dari Kementerian Keuangan mencapai Rp 913,5 triliun atau 46 persen dari pagu belanja dalam APBN-P 2015 yang besarnya mencapai Rp 1.984 triliun. Di sisi lain pemerintah juga menemukan anggaran belanja pemerintah yang ditransfer ke daerah mengendap di perbankan dan belum dimanfaatkan sebesar Rp 273 triliun sampai Juli 2015.

Rendahnya penyerapan anggaran sebagaimana dikutip dari surat kabar Kompas, 5 Agustus lalu itu, telah menjadi perbincangan publik

yang menyoroti aspek lambannya penyerapan anggaran di tengah kelesuan ekonomi global dewasa ini. Bagaimana pun, penyerapan anggaran yang lancar dengan tidak mengabaikan faktor efektivitas dan efisiensi, besar pengaruhnya dalam mendongkrak roda perekonomian.

Untunglah, memasuki September 2015 serapan anggaran mulai membaik. Penyerapan total APBN 2015 mencapai 55 persen. Menurut Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro, penyerapan anggaran yang dilakukan sejauh ini lebih cepat dibandingkan

tahun-tahun sebelumnya. Hanya memang karena waktu memulai penyerapannya lebih mundur dibanding tahun lalu, terutama karena perubahan nomenklatur di sejumlah kementerian, tingkat penyerapan belum optimal (Kompas, 16/09/2015).

Sebagai gambaran, prosentase penyerapan anggaran sejumlah kementerian/lembaga per 31 Agustus 2015 diperoleh data sebagai berikut: Kementerian Keuangan 59,6%, Bappenas 47,5%, BKPM 46,9%, Kementerian Koperasi dan UKM 39,4%, Kementerian Pertanian 37,9%, Kementerian Agraria 32,3%, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 30,8%, Kementerian BUMN 29,2%, Kemenko Perekonomian 28,7%, Kementerian PU dan Perumahan Rakyat 28,3%, Kementerian Perindustrian 20,9%, Kementerian Perdagangan 23,5%, dan Kementerian Tenaga Kerja 18% (Tribunnews, 07/09/2015).

Sementara, untuk level Pemerintah Provinsi, data Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri merinci lima daerah dengan penyerapan terendah sebagai berikut: DKI Jakarta 19,39%, Papua 21,74%, Kalimantan Utara 23,7%, Papua Barat 28,86%, dan Riau 29,8%. Sementara lima daerah dengan penyerapan tertinggi antara lain: Gorontalo 63,1%, Maluku Utara 63%, Kalimantan Tengah 62,9%, Nusa Tenggara Timur 57,6%, dan Sulawesi Tenggara 56,9% (Kompas, 05/10/2015).

### Belanja Pemerintah, Penyelamat Saat Krisis

Sebenarnya seberapa penting penyerapan anggaran pemerintah dalam menghadapi krisis ekonomi? Mari kita lihat fenomena serupa seperti yang terjadi beberapa tahun lalu. Ketika kelesuan pasar dunia terjadi pada 2009. Pada waktu itu, setidaknya China, Indonesia, India, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand mengalami pertumbuhan negatif ekspor yang dirinci pada tabel berikut:

Kenaikan Ekspor (Constant GDP 2005 US\$)

Negara	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
China	23,41	22,23	9,49	-10,24	27,73	10,33	7,02	8,67
Indonesia	9,41	8,54	9,53	-9,69	15,27	13,65	2,00	5,30
India	20,36	5,93	14,60	-4,69	19,62	15,58	6,66	7,28
Malaysia	6,68	3,77	1,57	-10,88	11,12	4,46	-1,83	0,63
Filipina	12,60	6,75	-2,68	-7,83	20,97	-2,54	8,54	-1,10
Singapura	11,22	8,59	4,58	-7,49	17,40	4,56	1,48	3,62
Thailand	9,15	7,82	5,09	-12,50	14,69	9,49	3,08	4,21

Sumber: www.worldbank.org (dilakukan pembulatan)

Sebagai salah satu unsur penyusun angka Gross Domestic Product (GDP) sebuah negara, ekspor yang negatif tentu sangat berpengaruh. Pada 2009 pertumbuhan GDP Malaysia, Singapura, dan Thailand mengalami penurunan yakni masing-masing -1,51%, 0,6%, dan -2,33%. Singapura, Malaysia dan Thailand merupakan negara sangat bergantung pada ekspor, sehingga lesunya pasar dunia langsung berpengaruh pada GDP.

Lalu apa yang terjadi pada negara-negara yang GDP-nya tidak negatif seperti China

(9,21%), India (8,48%), Indonesia (4,63%) dan Filipina (1,15%)? Selain ekspor, terdapat unsur penyusun GDP lainnya yakni konsumsi (C), belanja pemerintah (G) dan selisih ekspor dengan impor (X-I).

Untuk China, India dan Indonesia, kita dapat menebak bahwa unsur konsumsi masyarakat sangat membantu dikarenakan pada ketiga negara ini jumlah penduduknya sangat tinggi. Belanja pemerintah (G) sebagai unsur yang berkaitan dengan konsumsi (K) pasar domestik dapat dibaca pada tabel berikut:

Konsumsi dan Belanja Pemerintah (*Constant GDP 2005 US\$*)

Negara	2008		2009		2010		2011	
	C	G	C	G	C	G	C	G
China	5,89	5,89	13,89	8,22	3,38	10,92	9,97	9,47
Indonesia	3,68	3,68	4,29	15,67	4,94	0,32	3,85	3,22
India	11,15	11,15	6,08	13,88	7,10	5,77	10,04	6,86
Malaysia	8,35	8,35	1,41	4,94	6,17	3,44	8,76	16,20
Filipina	3,27	3,27	3,34	10,91	3,43	4,00	5,15	2,09
Singapura	6,81	6,81	-2,62	4,17	5,34	10,74	2,71	-1,12
Thailand	3,12	3,12	0,30	7,45	4,91	6,37	1,13	1,13

Sumber: *www.worldbank.org* (dilakukan pembulatan)

Dari tabel di atas kita melihat bahwa pasar domestik China sangat bisa diandalkan dalam meningkatkan konsumsi sebanyak 13,89%. Walau kenaikan belanja pemerintah tidak seberapa tinggi yaitu sebesar 8,22%, angka GDP masih dapat tertolong dari pertumbuhan negatif. Sebaliknya, belanja pemerintah pada Indonesia (15,67%), India (13,88%), dan Filipina (10,91%), belanja pemerintah merupakan faktor penyelamat di saat tingkat konsumsi tidak seberapa tinggi. Melihat data di atas, wajar jika saat krisis banyak orang meributkan rendahnya penyerapan anggaran pemerintah.

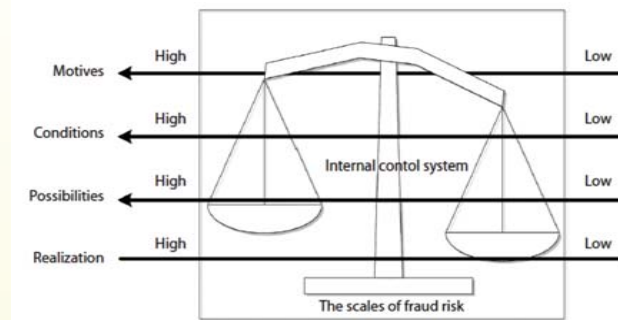
## Ketakutan Aparat

Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Haryana dalam wawancara tertulisnya dengan Majalah Pengawasan SOLUSI menjelaskan, beberapa faktor penyebab rendahnya realisasi anggaran, diantaranya adanya proses perubahan nomenklatur dan struktur organisasi Kementerian/Lembaga yang penyelesaiannya memerlukan waktu cukup lama; keterbatasan kompetensi pejabat perbendaharaan; pejabat pengelola keuangan Saker sering berganti. Faktor penyebab lain adalah pola perilaku menunda pekerjaan atau kurangnya disiplin dan kepatuhan terhadap

regulasi yang tidak memiliki sanksi; dan juga keterlambatan realisasi anggaran pada awal tahun, khususnya pada belanja modal juga terjadi akibat kelambatan penyedia barang dan jasa mengajukan tagihan sesuai dengan yang direncanakan.

Ada lagi faktor penyebab yang banyak disorot oleh media massa belakangan ini, yaitu adanya kehati-hatian dari pejabat perbendaharaan khususnya KPA dan PPK dalam melaksanakan pengadaan mengingat maraknya kasus tipikor yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Ketakutan ini muncul karena banyaknya pejabat atau pelaksana anggaran diseret ke meja hijau karena terlibat tindak pidana korupsi. Dipengaruhi oleh rasa takut itu banyak yang enggan merealisasikan program kegiatan yang telah dianggarkan. Yang jadi pertanyaan adalah, benarkah rasa ketakutan merupakan alasan akar? Mengapa ketakutan?

Jonas Mackevicius dan Lukas Giriunas (2013) dalam artikel jurnal bertajuk "Transformational Research of the Fraud Triangle" menawarkan model analisis Skala Fraud yang terdiri dari elemen-elemen: *Motives*, *Condition*, *Possibilities*, dan *Realization* seperti digambarkan berikut ini:



Jonas Mackevicius dan Lukas Giriunas menggambarkan *Internal Control System* sebagai latar dari keempat elemen yang menentukan terjadinya kecurangan (*fraud*) atau korupsi. Sebelum model Skala Fraud ini, teori mengenai *fraud* belum memperhitungkan pengaruh sistem pengendalian internal.

Kembali pada alasan lambatnya penyerapan anggaran yang berkemungkinan menjadi sebuah tindakan korupsi/*fraud* sehingga menimbulkan ketakutan, kita perlu melakukan evaluasi terhadap ada atau tidaknya dan berjalan atau tidaknya sistem pengendalian internal pada setiap organisasi/instansi. Pengendalian internal menurut definisi COSO (*Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission*) adalah sebuah proses yang dilakukan oleh pimpinan, majemen, dan personil lainnya yang dibuat untuk menyediakan jaminan yang masuk akal atas pencapaian tujuan operasional, pelaporan dan kepatuhan terhadap aturan.

Motivasi *fraud* ditentukan oleh kerakusan dan hal-hal lain dalam kehidupan yang terkait dengan kebutuhan akan uang, atau bahkan ketidakpuasan terhadap pimpinan. Secara umum motivasi terdiri dari dua kelompok, yaitu finansial dan nonfinansial. Cara mengurangi motivasi *fraud* sangat tergantung dari iklim organisasi, misalnya memberikan penghargaan/promosi terhadap pegawai serta mengatur fungsi-fungsi pada setiap pegawai untuk memastikan pengendalian internal berjalan dengan baik.

Kondisi *fraud* setidaknya terkelompok menjadi tujuh, yaitu: (1) kejujuran, kompetensi dan

gaya manajemen pimpinan, (2) pegawai-pegawai yang ada di organisasi, (3) struktur organisasi, (4) kondisi keuangan dan operasional yang dihasilkan oleh organisasi, (5) aktivitas organisasi dalam aktivitas yang lebih luas dan hubungannya dengan organisasi lain, (6) proses akuntansi, audit dan sistem pengendalian internal yang berjalan, (7) kondisi eksternal. Pimpinan organisasi, bagian keuangan dan auditor perlu

menentukan pada kondisi mana dalam organisasi tersebut terdapat kelemahan sehingga dapat dirinci upaya-upaya pencegahan yang terukur.

Kemungkinan *fraud* ditentukan oleh personil yang memiliki posisi dan kekuasaan dalam mengakses laporan keuangan, serta kuat atau lemahnya sistem pengendalian internal yang berjalan. Dalam perkembangannya *fraud* yang semula dilakukan oleh personil yang memiliki kompetensi rendah, kini menjadi dilakukan oleh personil yang berkemampuan tinggi.

Realisasi *fraud* sangat tergantung pada ketiga elemen sebelumnya. *Fraud* terjadi sesuai dengan skalanya. Pada tingkat pertama, *fraud* terjadi saat ada *intention* (niat), sementara pada tingkat kedua terjadi saat ada *preparation* (persiapan). Pada tingkat persiapan ini, pelaku *fraud* akan mulai bekerja sama (terkoordinasi).

Mengingat bahwa sistem pengendalian internal merupakan proses terus-menerus yang tidak hanya dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), maka pimpinan dan setiap personil dalam sebuah organisasi juga perlu terus meningkatkan pengendalian internal terhadap keempat elemen *fraud*.

Setelah melihat pentingnya penyerapan anggaran dalam membangun perekonomian negara serta pentingnya mengoptimalkan sistem pengendalian internal, maka masihkah layak bersembunyi di balik ketakutan? (**Trinanti Sulamit**).



# Penyerapan Anggaran Mengapa Lamban ?

*Penyerapan anggaran yang lamban menimbulkan pertanyaan: mengapa? Untuk menjawab pertanyaan tersebut serta permasalahan lain di sekitar penyerapan anggaran, Redaksi Majalah Pengawasan SOLUSI melakukan wawancara tertulis dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Haryana. Petikan hasil wawancara setelah proses penyuntingan, kami sampaikan berikut ini:*

**Akhir-akhir ini ramai diperbincangkan tentang lambannya penyerapan anggaran. Apa yang menjadi penyebab penyerapan anggaran begitu lamban?**

Berdasarkan data yang kami miliki, realisasi penyerapan anggaran Kementerian Negara/Lembaga sampai dengan bulan Agustus 2015 adalah sebesar 40,10% dari anggaran yang tercantum dalam DIPA (Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran).

Realisasi ini lebih rendah daripada rata-rata realisasi anggaran periode 2011-2014 dan rencana realisasi anggaran sebagaimana tercantum dalam DIPA. Terkait rendahnya realisasi tersebut, terdapat beberapa penyebab, antara lain:

- adanya proses perubahan nomenklatur dan struktur organisasi Kementerian/Lembaga yang penyelesaiannya memerlukan waktu cukup lama.
- keterbatasan kompetensi pejabat perbendaharaan.
- pejabat pengelola keuangan Satker sering berganti.
- adanya kehati-hatian dari pejabat perbendaharaan khususnya KPA dan PPK dalam melaksanakan pengadaan mengingat maraknya kasus tipikor yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa.
- pola perilaku menunda pekerjaan atau kurangnya disiplin dan kepatuhan terhadap regulasi yang tidak memiliki sanksi.
- keterlambatan realisasi anggaran pada awal tahun, khususnya pada belanja modal juga terjadi akibat kelambatan penyedia barang dan jasa mengajukan tagihan sesuai dengan yang direncanakan

**Apa akibatnya jika penyerapan anggaran begitu lamban?**

Penyerapan anggaran yang terlambat tersebut menimbulkan beberapa konsekuensi, antara lain

terhambatnya pertumbuhan ekonomi, karena APBN ditujukan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Disamping itu, hilangnya manfaat belanja akibat dana yang menganggur, sementara di sisi lain terdapat kebutuhan dana untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah lainnya yang telah terjadwal.

**Apa yang membedakan proses penyerapan anggaran tahun ini dengan tahun lalu?**

Beberapa hal signifikan yang mempengaruhi penyerapan anggaran tahun ini lebih lambat dibanding tahun lalu antara lain adalah:

- penghematan belanja perjalanan dinas dan *meeting/konsinyering* dalam rangka meningkatkan kualitas belanja dan kapasitas pendanaan program prioritas nasional;
- perubahan nomenklatur, penggabungan dan/atau likuidasi Kementerian Negara/Lembaga;
- perhatian pelaksanaan anggaran belanja bansos sesuai rekomendasi KPK dan hasil revidu BPKP;
- perubahan mekanisme penyaluran bantuan pemerintah dengan terbitnya PMK Nomor 164 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada K/L. Perubahan tersebut menjadikan penyaluran bantuan pemerintah (eks bansos) menjadi mudah tetapi tetap sesuai kaidah.
- pembatasan penerima bansos hanya untuk orang miskin/tidak mampu dengan revisi PMK Nomor 81 Tahun 2012 tentang Belanja Bansos pada K/L. Revisi tersebut juga mencakup mekanisme penyaluran bansos dengan *e-money*.

**Bagaimana tren penyerapan anggaran belanja di daerah? Apa bedanya dengan di pusat?**

Anggaran belanja di daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang

realisasi penyerapannya sepenuhnya merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah. Beberapa komponen APBD juga berasal dari pemerintah pusat berupa pengelolaan dana transfer maupun pengelolaan dana dekonsentrasi/tugas pembantuan.

Realisasi penyerapan anggaran belanja oleh Pemerintah Daerah secara teknis dimonitoring oleh Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu. Sedangkan Ditjen Perbendaharaan berkewajiban menyalurkan dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa ke Pemerintah Daerah berdasarkan permintaan dari Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu.

Pada prinsipnya, pengelolaan keuangan pusat dan daerah memiliki regulasi yang sama yaitu UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan baik dari Kementerian Keuangan maupun unit gabungan seperti Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) mengindikasikan kendala penyerapan anggaran daerah tidak berbeda dengan anggaran pemerintah pusat.

Namun demikian, hingga saat ini masih banyak pemerintah daerah yang hanya menempatkan anggaran pembangunan daerahnya sebagai simpanan di bank. Selain itu, isu ketatnya peraturan dan pengawasan penggunaan anggaran juga didungungkan mewarnai rendahnya penyerapan anggaran di daerah. Untuk itu, perlu adanya kesamaan pemahaman dan persepsi antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah mengenai administrasi pemerintahan dan permasalahan kerugian negara dalam pelaksanaan anggaran sehingga dapat mengurangi kekuatan pemerintah daerah dalam melaksanakan anggaran.

**Apakah tren anggaran penerimaan juga mengalami perlambatan pada tahun ini?**

Keseluruhan realisasi penerimaan, belanja, dan deficit APBN menunjukkan tren yang selalu meningkat tiap tahunnya. Porsi penerimaan perpajakan yang melebihi 2/3 total penerimaan menyebabkan besar kecilnya realisasi penerimaan APBN sangat dipengaruhi oleh penerimaan perpajakan.

Melihat perkembangan terkini, penerimaan perpajakan diperkirakan akan melambat dan tidak mencapai target dari yang telah ditetapkan pada APBN-PA TA 2015. Secara teknis, Ditjen Pajak akan lebih berwenang dalam menjelaskan permasalahan tersebut,

mengingat kapasitas dan kompetensi teknis terkait pemenuhan target capaian ada di Ditjen Pajak.

**Benarkah pada belanja daerah terdapat kecenderungan kepala daerah menahan realisasi anggaran dengan menumpuk uang pada rekening bank dengan tujuan memperoleh bunga?**

Hal tersebut secara teknis akan lebih tepat dijawab oleh Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Namun dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari Ditjen Perimbangan Keuangan, dalam tahun 2011 – 2014 dana pemerintah daerah di perbankan sampai dengan bulan Juni mengalami peningkatan, demikian juga pada posisi Juni 2015 terdapat lonjakan yang cukup signifikan yaitu mencapai Rp273,5 triliun. Penyebabnya antara lain karena dana yang sudah ditransfer ke daerah belum sepenuhnya dipergunakan untuk mendanai belanja daerah terutama untuk belanja modal infrastruktur mengingat sebagian besar daerah masih dalam proses persiapan pelaksanaan kegiatan.

**Bagaimana pendapat Bapak tentang ketakutan dikriminalisasi sejumlah pihak terkait dengan penyerapan anggaran?**

Perlu untuk diketahui bersama, bahwa terdapat perbedaan yang mendasar antara perusahaan privat dan pemerintahan (*public*) pada kepemilikan (*ownership*) asset terutama uang. Pemerintah mengelola uang pembayar pajak yang tidak bias diperlakukan seperti uang pribadi. Sistem yang dibangun pemerintah dalam tatakelola perbendaharaan memang menitikberatkan ke proses *governance* yang baik terutama soal akuntabilitas. Dampaknya memang, pengelola perbendaharaan negara baik pusat maupun daerah, harus berhati-hati.

Saat ini memang ada dilema untuk membedakan permasalahan administratif dan pidana korupsi. Oleh karena itu, perlu adanya penyamaan persepsi terutama dengan penegak hukum dan para pembayar keputusan (kuasa pengguna anggaran/KPA) terkait kewenangan formal dan material dalam pelaksanaan anggaran. Ketakutan para pembayar keputusan tersebut dapat dimengerti karena sudah banyak contoh para pejabat yang bermaksud baik namun ternyata dipidanakan. Akibatnya, ketakutan ini juga menyebabkan lambatnya realisasi anggaran karena pengelola keuangan terlalu berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya (**Edwardsyah Nurdin**).

# Takut

Oleh : Edwardsyah Nurdin  
Redaktur Majalah Pengawasan SOLUSI

Setiap orang pasti punya rasa takut, cemas, khawatir. Paling tidak, seberani-beraninya seseorang pasti pernah mengalami rasa takut. Bagaimanapun, perasaan takut adalah sesuatu yang manusiawi. Takut merupakan salah satu dari emosi dasar yang dimiliki manusia, seperti sedih, marah, berani, bahagia dan sebagainya. Paling-paling yang membedakan adalah sikap dalam menghadapi rasa takut tersebut. Ada yang mampu menyimpan dan meredam rasa takutnya, ada juga yang tidak bisa sehingga akhirnya mengalami stres ketika menemui hal-hal yang menakutkan itu.

Rasa takut itu sendiri beragam bentuk dan penyebabnya. Ada yang takut kehilangan pasangan kekasih dikarenakan rasa cemburu yang berlebihan. Ada yang takut pada kegelapan bahkan sampai tidak bisa tidur bila lampu kamar dimatikan. Ada yang takut pada ketinggian sehingga oleh karenanya selalu menghindar bila harus bepergian menggunakan pesawat udara. Dan masih banyak lagi contoh dari rasa takut yang bisa datang silih berganti, tergantung dari situasi dan permasalahan yang dihadapi.

Dari sisi pengendalian, rasa takut itu pasti ada manfaatnya. Dengan adanya rasa takut, seseorang akan berhitung dengan matang untuk menghadapi kemungkinan risiko yang akan terjadi. Apalagi jika menyangkut risiko terkait dengan tata kelola keuangan.

Nah, yang terkait dengan tata kelola keuangan - khususnya keuangan negara - rasa

takut itu agaknya tengah disuarakan oleh para pihak yang tugas dan tanggung jawabnya berhubungan langsung dengan pengelola keuangan negara, baik itu Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), atau pun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Baru-baru ini sejumlah kepala daerah dengan terus terang mengemukakan ketakutan itu. Sejumlah pemimpin daerah berharap agar penegak hukum tidak mencari-cari potensi kesalahan kepala daerah. Kepala daerah khawatir akan kemungkinan terkena jeratan hukum. Akibatnya, mereka tidak berani berinovasi ketika mengeluarkan kebijakan (*Kompas*, 17/09/2015).

Dalam perspektif pemikiran yang sederhana kita tentu akan bertanya: kenapa harus takut kalau tidak besalah? Kalau kita mengelola keuangan negara sesuai dengan peraturan yang berlaku, apa pula yang harus ditakutkan?!

Tapi itu perspektif pemikiran yang terlalu sederhana. Teman saya, seorang auditor madya yang telah berpengalaman malang-melintang melakukan audit, berujar: "Di lapangan, praktik pengelolaan keuangan negara tidak sesederhana itu. Banyak peraturan yang kadang-kadang bikin *ribet*, belum lagi tekanan ketika harus berhadapan dengan oknum kekuasaan, berhadapan dengan oknum mafia, berhadapan dengan oknum LSM yang tak jelas, berhadapan dengan oknum penegak hukum yang mencari-cari kesalahan padahal di baliknyanya ada maksud tertentu!" Lalu teman

auditor tersebut memberi contoh beberapa kasus. Dan saya hanya termangut-mangut mendengarnya.

Yang terbersit dalam benak saya adalah, dengan adanya ketakutan itu maka yang terkena dampaknya justru rakyat banyak. Program pembangunan tidak optimal, penyerapan anggaran terhambat sehingga mempengaruhi gerak roda perekonomian, pelayanan kepada publik pun ikut terganggu.

Barangkali itulah sebabnya pemerintah tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Sanksi Administratif sebagai turunan dari Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Melalui peraturan tersebut akan diberikan jaminan perlindungan hukum bagi aparat pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan, termasuk tugas-tugas yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Untuk itu akan diatur koordinasi antara penegak hukum dengan aparat pengawas internal pemerintah (APIP) apabila ada dugaan pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan pejabat pemerintah. Dalam hal ini APIP yang akan terlebih dahulu memeriksa dan menentukan apakah pelanggaran tersebut hanya bersifat administratif, atau ada unsur pelanggaran pidana. Bila memang ada unsur pelanggaran pidana, barulah APIP menyerahkan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum.

Menyambut kelahiran peraturan tersebut maka peran APIP - khususnya auditor - haruslah diperkuat. Ini untuk menangkal persepsi publik yang kurang percaya APIP akan berani bersikap independen baik kepada "atasan" atau pun sesama "kolega" sendiri. Dan ini merupakan sebuah problema tersendiri, tak lain dikarenakan mengingat posisi keberadaan APIP dalam struktur keorganisasian baik pada kementerian/lembaga maupun pemerintah

daerah. Bagaimanapun, APIP berada di bawah Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang dalam hal ini adalah menteri/kepala lembaga dan kepala daerah. Dalam posisi demikian, dapatkah APIP bertindak independen untuk bersuara ketika mencium adanya pelanggaran administratif, atau terlebih-lebih ada pelanggaran pidana?!

Pada sisi lain kapabilitas APIP pada umumnya masih rendah. Sekitar 82% dari keseluruhan jumlah APIP masih berada di level 1 atau terendah dari lima level penilaian kapabilitas; yang menandakan APIP dinilai belum dapat menjamin proses tata kelola sesuai peraturan dan mencegah korupsi. Dengan kondisi demikian, akan mampukah APIP melaksanakan Peraturan Pemerintah tentang Sanksi Administratif tersebut sebagaimana mestinya?

Kembali kepada pokok masalah, ada juga pertanyaan yang menggelitik di benak saya: kenapa ketakutan itu disuarakan saat ini, ketika para aparat penegak hukum kian gencar menyoroti dan menyeret para pejabat dan mantan pejabat serta pengelola keuangan negara ke ranah hukum? Jangan-jangan ini bentuk perlawanan karena "niat terselubung" terancam terbuka kedoknya sehingga diambil keputusan "biarlah anggaran itu mengendap saja; toh, kita tidak akan dapat apa-apa. Kita hanya dapat capeknya saja, jika anggaran itu dicairkan sesuai peraturan".

Mengakhiri tulisan ini saya hanya bisa berharap: mudah-mudahan pertanyaan yang menggelitik itu hanya prasangka belaka. Tapi jika memang benar ketakutan itu merupakan bentuk perlawanan atau resistensi dari "niat terselubung" untuk memburu rente, saya hanya bisa berucap: "*Naudzubillahimindzalik!*"





## Rendahnya Penyerapan Anggaran pada Kementerian/Lembaga

Oleh : Primertiningsih  
Kabag Keuangan dan Rumah Tangga  
pada Sekretariat Inspektorat Jenderal Kemenperin

Seiring dengan reformasi yang mulai digulirkan pasca lengsernya Presiden Soeharto pada tahun 1998, pemerintah secara bertahap mereformasi sistem keuangan dengan menetapkan tiga paket Undang-Undang yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Ketiga paket perundang-undangan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Ketiga paket

Undang-Undang tersebut diharapkan dapat meningkatkan profesionalitas, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.

Namun dalam pengimplementasian undang-undang tersebut selalu muncul masalah rendahnya penyerapan anggaran oleh beberapa Kementerian/Lembaga. Persoalan rendahnya penyerapan anggaran selalu muncul setiap tahunnya. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menggenjot percepatan penyerapan anggaran, namun kenyataannya

belum ada perubahan berarti terkait dengan lambannya penyerapan anggaran. Padahal untuk mempercepat proses pembangunan dan memacu pertumbuhan ekonomi diperlukan proses penyerapan anggaran secara optimal.

Di tengah lesunya perekonomian saat ini, tak kurang dari Presiden Joko Widodo yang berulang kali menyerukan kepada para pimpinan kementerian/lembaga serta para kepala daerah provinsi/kabupaten/kota agar mempercepat realisasi anggaran, namun tetap saja realisasi tak sesuai dengan yang diharapkan.

### Dampak Negatif

Lambatnya penyerapan anggaran menunjukkan kualitas kinerja dan itu jelas akan berdampak pada rendahnya laju pertumbuhan ekonomi. Untuk mempercepat pembangunan dan memacu pertumbuhan ekonomi diperlukan proses penyerapan anggaran yang terjadwal sehingga memberikan pengaruh yang signifikan bagi pergerakan roda perekonomian nasional. Bagaimana pun, penyerapan anggaran pada kementerian/lembaga memberikan dampak signifikan bagi penggerak perekonomian Indonesia dan menjadi salah satu tolok ukur kinerja pemerintah.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 pasal 58 ayat (1) menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku kepala pemerintahan mengatur

dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. Untuk itu Presiden juga memberikan mandat kepada Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) guna memantau laju penyerapan anggaran pada Kementerian/Lembaga.

Realisasi anggaran merupakan potret dari seberapa besar belanja pemerintah telah direalisasikan. Pengelolaan anggaran negara yang baik dan optimal khususnya pada sisi belanja/pengeluaran dapat menggerakkan roda perekonomian, memberikan pendapatan bagi masyarakat dan menumbuhkan pertumbuhan ekonomi secara makro dan mikro yang dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian serapan anggaran sebagai wujud dari belanja pemerintah yang optimal sangat diharapkan realisasinya.

### Faktor Penyebab

Terkait dengan masalah rendahnya penyerapan anggaran yang selalu berulang, timbul pertanyaan: mengapa demikian? Menurut penulis, ada beberapa penyebab yang diduga menjadi faktor rendahnya realisasi anggaran pada Kementerian/Lembaga. Pertama; penyusunan perencanaan anggaran yang kurang matang. Kekurangmatangan tersebut mengakibatkan Satker sering melakukan revisi anggaran di tengah jalan. Perencanaan merupakan salah satu siklus

dalam penyusunan anggaran, untuk itu dalam penyusunannya harus disertai dengan dokumen yang lengkap dan memadai seperti *Term of Reference* (TOR), Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan lain-lain. Apabila hal ini tidak dilakukan maka anggaran yang diajukan diberi tanda bintang/blokir.

Kedua; faktor lain yang turut mempengaruhi adalah keterlambatan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. User, dalam hal ini Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kerap terlambat mengirimkan berkas yang dibutuhkan untuk pelaksanaan lelang ke Unit Layanan Pengadaan (ULP). Demikian pula dalam proses lelang waktu pelaksanaannya pun relatif panjang; dan akan lebih panjang lagi apabila ada permasalahan dalam proses lelang tersebut sehingga menimbulkan saggah dan saggah banding.

Ketiga; dari sisi pencairan anggaran ke KPPN, satuan kerja (satker) kurang disiplin dalam melakukan rekonsiliasi dengan KPPN sehingga sering mendapat sanksi penundaan pencairan anggaran. Dalam hal ini Kementerian Keuangan telah menetapkan untuk melakukan rekonsiliasi setiap tanggal 10 setelah bulan yang bersangkutan berakhir. Namun masih banyak satuan kerja yang terlambat menyampaikan dokumen sebagai kelengkapan data untuk rekonsiliasi. Sesuai dengan PMK 210/PMK.05/2013 dinyatakan bahwa "hari berikutnya setelah tanggal terakhir rekonsiliasi langsung diterbitkan SP2S (Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi)". Sanksi yang diterapkan berupa penundaan penerbitan SP2D atas SPM yang diajukan satker kecuali untuk SPM-LS belanja pegawai, SPM-LS pihak ketiga dan SPM Pengembalian.

Keempat; adanya perubahan sistem penganggaran dari *cash*

*basis* menjadi *acrual basis* pada awal tahun anggaran 2015. Hal ini juga mempengaruhi percepatan realisasi anggaran pada semester I - 2015 disebabkan belum optimalnya sistem yang ada. Pada awalnya terdapat beberapa hambatan walaupun pada saat ini sudah dapat diimplementasikan dengan lancar.

Apa yang penulis paparkan di atas adalah faktor penyebab yang bersifat teknis. Di samping itu ada faktor penyebab yang bersifat non-teknis, misalnya ketakutan/kekhawatiran KPA, PPK dikriminalisasi oleh penegak hukum karena kesalahan administrasi atau salah dalam mengambil suatu kebijakan; permasalahan di lapangan untuk pekerjaan-pekerjaan pembangunan infrastruktur, seperti pembebasan lahan dan sebagainya.

Atas permasalahan-permasalahan tersebut maka langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam mempercepat penyerapan realisasi anggaran pada masing-masing satker, khususnya yang terkait dengan teknis penganggaran, antara lain dengan menyusun *disbursmen plan* (rencana penyerapan anggaran) yang akurat; mempercepat revisi anggaran untuk kegiatan utamanya diberi tanda bintang; melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah disusun pada awal perencanaan; serta merealisasikan seluruh belanja yang sudah lengkap dokumen pertanggungjawabannya.



*“Agar kita tetap eksis maka kita perlu berubah, karena perubahan akan menghasilkan kematangan, dan kematangan akan menciptakan diri kita.”*

*(Henri Bergson)*





## Reshuffle Kabinet, Penyerapan Anggaran dan Setahun Pemerintahan Jokowi - JK

Bagi bangsa Indonesia, Agustus adalah bulan kemerdekaan. Tepat pada tanggal 17 Agustus tahun ini bangsa Indonesia memperingati ulang tahun ke-70 kemerdekaan RI. Seperti biasa, puncak Peringatan Detik-detik Kemerdekaan RI diselenggarakan di Istana Merdeka yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Namun ada yang berbeda peringatan kali ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Selain mengundang masyarakat umum, acara kali ini juga diisi oleh dua pelajar yang membacakan impiannya tentang Indonesia.

Apa saja impian anak Indonesia itu? Ayo, kita simak impian-impian tersebut. Sepuluh tahun mendatang tak ada lagi korupsi sehingga uang untuk pendidikan tak lagi kurang; anak Indonesia pintar sehingga Indonesia menjadi negara *superpower*; tiga tahun mendatang

akses internet bisa di seluruh Indonesia, Wi-Fi gratis dan cepat. Impian lainnya adalah Indonesia jadi juara olimpiade; semua orang bisa minum air dari keran, bersih, sehat, uang jajan tidak berkurang; lima tahun mendatang ingin melihat Indonesia yang lebih kompak sehingga negara lebih kuat. Selanjutnya, sepuluh tahun mendatang ingin melihat Indonesia menjadi mutiara yang berkilau, sehingga bukan kita yang mencari kerja ke negara lain, tapi mereka yang cari kerja ke Indonesia; sepuluh tahun mendatang ingin melihat Indonesia jadi mandiri, tak tergantung negara lain; serta hasil bumi dan tambang dikelola sendiri (Kompas, 18/08/2015).

Mimpi-mimpi anak Indonesia itu dibacakan oleh Erlangga Abiantara, siswa kelas 8C SMP Labschool, Jakarta Timur dan Maria Rosana Lintang Christiani, siswa kelas

6B SD Maria Fransiska, Bekasi. Mimpi-mimpi itu sungguh menggetarkan kalbu dan oleh karenanya patut digarisbawahi. Untuk itu, selaku aparat birokrasi pemerintah maka menjadi kewajiban kita berupaya mewujudkan impian generasi penerus bangsa tersebut.

Tradisi lain di bulan Agustus adalah penyampaian pidato RAPBN 2016 dan Nota Keuangan pada sidang Paripurna DPR di Jakarta pada 14 Agustus lalu. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menjelaskan tentang adanya perubahan alokasi anggaran, yaitu dengan meningkatkan alokasi anggaran transfer ke daerah dan dana desa sehingga lebih besar daripada total belanja kementerian dan lembaga negara. Tujuannya adalah untuk mempercepat penguatan peran daerah dalam penyediaan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, agar lebih sesuai dengan pembagian kewenangan pemerintah pusat dan daerah serta kebutuhan pendanaan pembangunan daerah.

Secara umum, postur RAPBN 2016 terdiri dari pendapatan negara sebesar Rp 1.848,1 triliun sedangkan belanja negara sebesar Rp 2.121,3 triliun sehingga defisit sebesar Rp 273,2 triliun. Pendapatan negara diperoleh dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.565,8 triliun; penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 280,3 triliun dan penerimaan

hibah sebesar Rp 2,0 triliun. Belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.339,1 triliun, yang terdiri dari belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 780,4 triliun dan belanja non-kementerian/lembaga sebesar Rp 558,7 triliun; sedangkan transfer ke daerah sebesar Rp 735,2 triliun dan dana desa sebesar Rp 47,0 triliun.

Peristiwa lain yang layak pada Agustus lalu adalah reshuffle Kabinet Kerja setelah dua-tiga bulan sebelumnya ramai diperbincangkan publik. Pada 12 Agustus lalu Presiden Joko Widodo melantik lima menteri dan satu pejabat setingkat menteri di Istana Negara, Jakarta, Kelima menteri tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menggantikan Sofyan Djalil; Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menggantikan Indroyono Soesilo; Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil menggantikan Andrinof Chaniago; Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong menggantikan Rachmat Gobel; dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung Wibowo menggantikan Andi Widjajanto.

Perombakan kabinet sebagaimana dinyatakan dalam siaran pers oleh Tim Komunikasi Presiden Tetan Masduki, disebutkan

**“Silahkan anda mencari pengetahuan sebanyak mungkin, tetapi kalau tidak didukung oleh imanjinasi, yang akan Anda miliki hanyalah pengetahuan, bukan kemampuan menaklukkan realita.”**  
(Albert Einstein)



sebagai respon atas dinamika perekonomian global yang berdampak terhadap ekonomi dalam negeri. Pelambatan perekonomian global membutuhkan kecepatan dan kapasitas adaptasi dalam menangani permasalahan yang terjadi untuk memperkuat perekonomian nasional serta mempercepat program-program pemerintah. Perombakan kabinet ini juga merupakan bagian dari langkah perbaikan manajerial pemerintahan memperkuat sinergi dan koordinasi lintas kementerian (Kompas, 13/08/2015).

Berbeda dengan ketika membentuk Kabinet Kerja tahun lalu, pengangkatan para menteri dan pejabat setingkat menteri kali ini tidak melibatkan KPK dan PPKAT dalam penelusuran rekam jejak mereka. Terkait dengan hal ini, anggota Tim Komunikasi Presiden Tetan Masduki menyatakan, KPK dan PPKAT tidak dilibatkan karena figur yang dilantik tersebut sudah cukup diketahui publik.

Presiden juga cukup mengenal dan mengetahui integritas mereka (Kompas, 14/08/2015).

Banyak kalangan menyambut baik perombakan kabinet pada pertengahan Agustus itu. Kita berharap kehadiran para menteri dan pejabat setingkat menteri itu dapat mengoptimalkan jalannya roda pemerintahan serta memberikan angin segar bagi pemulihan ekonomi nasional yang agak tersendat belakangan ini.

Ketersendatan pertumbuhan ekonomi belakangan ini, ditengarai bukan hanya dampak dari perekonomian global, tapi kelambanan penyerapan anggaran juga turut mempengaruhi. Yang paling mencolok adalah kelambanan penyerapan dana bantuan dekonsentrasi yang nilainya mencapai Rp 250 triliun dan sudah ditransfer ke pemerintah daerah namun baru terserap 0,9 persen. Rendahnya penyerapan itu disampaikan

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sesuai menghadiri rapat terbatas di Kantor Presiden, 7 Juli lalu. (Kompas, 08/07/2015).

Namun, pada pertengahan September 2015 penyerapan anggaran, khususnya APBN 2015, mulai membaik. Pada pekan pertama September lalu, penyerapan total APBN telah mencapai 55 persen. Kementerian Keuangan memproyeksikan penyerapan APBN sampai akhir tahun mencapai 94-96 persen; sementara untuk belanja modal diproyeksikan 80-85 persen.

“Sudah lebih cepat dibandingkan tahun lalu. Secara nominal lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Bedanya di prosentase yang lebih kecil karena sekarang pagunya lebih besar,” kata Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro (Kompas, 16/9/2015).

Terkait dengan rendahnya penyerapan anggaran, ramai diberitakan bahwa salah satu penyebabnya adalah ketakutan dan kekhawatiran para kepala daerah terkena jeratan hukum. Kekhawatiran itu mencuat dalam diskusi “Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur” yang digelar oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Jakarta, 16 September lalu (Kompas, 17/09/2015).

Salah seorang peserta, Bupati Tangerang Ahmad Zaki Iskandar meminta agar aparat penegak hukum di daerah tidak ditarget untuk mampu menyelesaikan kasus korupsi dalam jumlah tertentu. Pasalnya, hal itu berpotensi membuat para kepala daerah menjadi target/incaran para penegak hukum.

Sehubungan dengan kekhawatiran itu, pemerintah tengah mempersiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Sanksi Administrasi, sebagai turunan dari Undang-Undang No. 20 tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan, sebagai bentuk jaminan perlindungan hukum bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melaksanakan tugasnya.

Salah satu isi dari peraturan tersebut adalah mengatur perlunya penegak hukum berkoordinasi dengan aparat pengawas internal pemerintah (APIP) dalam penanganan pengaduan masyarakat terkait dengan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan pejabat pemerintah. APIP akan memeriksa terlebih dahulu ada tidaknya dugaan itu dan akan memutuskan apakah itu merupakan pelanggaran administratif atau termasuk penyalahgunaan wewenang yang berujung pada tindak pidana.

Masih terkait dengan akan dikeluarkannya PP tentang Sanksi Administrasi, perlu juga disimak tanggapan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja, 13 September lalu di Jakarta mengatakan, pihaknya memang tidak menangani persoalan mala-administrasi dalam pengadaan barang/jasa. Itu merupakan wewenang dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Ia pun memastikan, KPK tidak pernah melakukan kriminalisasi terhadap kebijakan pemerintah (Kompas, 14/09/2015).

Menyambut kelahiran PP tentang Sanksi Administrasi, yang perlu digarisbawahi adalah upaya penguatan APIP. Peraturan pemerintah tersebut jelas memberi sinyal bahwa APIP sangat berperan dalam menentukan apakah suatu pelanggaran lebih bersifat administratif, atau ada unsur pidana sehingga perlu ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Untuk itu diperlukan APIP yang memiliki kapabilitas tinggi dan kuat.

Pada bulan Oktober ini, tepatnya 20 Oktober 2015 tepat setahun Joko Widodo – Jusuf Kalla memimpin pemerintahan. Sudah menjadi kelaziman, publik memberi penilaian terhadap kinerja pemerintahan di bawah kepemimpinan Jokowi – JK tersebut. Penilaian



itu biasanya dilakukan melalui survei.

Survei yang dilakukan surat kabar KOMPAS terhadap kinerja pemerintahan Jokowi – JK selama satu tahun pemerintahannya menunjukkan tingkat kepuasan yang cenderung menurun, meski nada puas lebih dominan ketimbang sebaliknya. Nada puas berada pada angka 54,2%; turun dibanding periode Januari 2015 sebesar 61,7% dan periode Juli 2015 sebesar 57,0%. Sedangkan yang menyatakan tidak puas berjumlah 43,1%, meningkat dari periode Januari 2015 sebesar 37,6% dan Juli 2015 sebesar 40,1%. Sisanya menyatakan “tidak tahu”.

Dari empat bidang yang disurvei yaitu bidang politik, hukum, ekonomi dan kesejahteraan sosial; prosentase kepuasan tertinggi ada pada bidang politik (67,9%) yang disusul kemudian dengan bidang kesejahteraan sosial (61,4%), bidang hukum (46,5%) dan terendah adalah bidang ekonomi dengan angka 41,7 (Kompas, 20/10/2015).

Hasil survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas dengan sampling error  $\pm 2,8$  itu tentunya dapat kita maklumi. Ekspektasi publik yang tinggi atas terpilihnya Jokowi – JK memimpin pemerintahan selama periode 2015 – 2019 itu mengandung harapan yang luar biasa, sementara realitas di lapangan amat rumit dan kompleks. Dalam hal ekonomi misalnya, secara eksternal ada indikasi terjadi kelesuan ekonomi dan pada saat bersamaan penopang jalannya perekonomian tidak sepenuhnya bebas dari persoalan. Demikian pula masih terjadi tarik-menarik kekuatan politik internal yang berimplikasi bagi jalannya pemerintahan.

Mengomentari setahun kepemimpinan Jokowi – JK, pengamat politik dari Charta Politika Yunarto Wijaya berkomentar: “Pencapaian terbesar Jokowi dalam satu tahun pertama pemerintahannya ada di bidang politik. Di bidang ekonomi, kita masih

terhambat. Di bidang hukum, revisi UU KPK yang kembali menggaung belakangan ini menjadi tanda tanya besar terhadap komitmen pemerintah akan penegakan hukum.”

Sementara, pada kesempatan terpisah Ketua Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Suryoprato mengingatkan tentang kondisi ekonomi yang masih tidak terlalu cerah. “Pemerintah harus segera mendorong daya beli masyarakat yang melemah dengan memberikan stimulus fiskal dan stimulus moneter yang lebih efektif,” ujar Suryoprato (Kompas, 20/10/2015).

Menyambut satu tahun pemerintahan Jokowi – JK, ada beberapa hal yang patut digarisbawahi. Menurunnya tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan, terutama dalam bidang ekonomi pada hakekatnya dapat kita maklumi. Jalannya pemerintahan baru satu tahun dan itu pun sudah harus menghadapi persoalan rumit terutama karena pengaruh pelambatan ekonomi global dewasa ini. Apalagi saat ini sudah ada tanda-tanda perbaikan, yang ditunjukkan dengan pelemahan rupiah yang semakin mereda sementara indeks IHSG semakin menguat. Beberapa paket kebijakan pemerintah yang diluncurkan beberapa waktu lalu agaknya mulai memperlihatkan hasil, walau masih sedikit.

Kita masih melihat keseriusan Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin pemerintahan secara bersungguh-sungguh, bukan hanya sekedar pencitraan. Sudah selayaknya, kita sebagai aparat birokrasi pemerintah terus mendukung dan berpartisipasi aktif menjalankan roda pemerintahan dengan sebaik-baiknya; dan terus berupaya mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Bagaimana pun, ini juga merupakan harapan rakyat yang harus kita upayakan untuk memenuhinya. (EN).



## Membaca Arah Kebijakan Industri Otomotif

Agustus lalu, berlangsung dua kegiatan pameran otomotif nasional yang diselenggarakan pada waktu bersamaan di dua tempat terpisah. Masing-masing adalah Indonesia International Motor Show (IIMS) yang diselenggarakan di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta; dan pameran lainnya adalah Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) yang berlangsung di Indonesia Convention Exhibition, Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan. Kedua pameran otomotif skala nasional itu berlangsung bersamaan pada 20 – 30 Agustus 2015. Nilai transaksi yang diperoleh selama berlangsungnya IIMS 2015 mencapai Rp 1,636 triliun dari transaksi 4.894 unit mobil dan sepeda motor. Sementara pada GIIAS 2015 berhasil menorehkan nilai transaksi mencapai Rp 5,455 triliun. Nilai ini didasarkan pada perhitungan surat pemesanan kendaraan (SPK) yang masuk sebanyak 17.077 unit kendaraan.

Di tengah lesunya pasar otomotif belakangan ini, kedua pameran otomotif yang berlangsung Agustus lalu adalah upaya yang layak diapresiasi.

Wakil Presiden Jusuf Kalla ketika membuka secara resmi GIAAS 2015 berujar: “Mobil di mana pun di dunia ini sudah jadi kebutuhan yang mendasar, karena itu sumber-sumber kemajuan dan keuangan banyak negara dari besarnya penjualan mobil.” Menurut Kalla, ketika berbicara tentang mobil yang terpikirkan tidak hanya alat transportasi, tetapi juga industri yang besar. Otomotif didukung oleh vendor, industri komponen, teknologi untuk efisiensi bahan bakar, inovasi untuk mengimbangi kebutuhan desain, serta jaringan dealer yang menyebar ke seluruh Indonesia. Selain itu, industri otomotif juga melibatkan banyak orang yang berarti membuka lapangan pekerjaan. Setiap pembelian dan kepemilikan mobil juga menjadi penghasil pajak yang besar buat negara (Kompas.Com).

### Tetap Optimis

Memasuki tahun 2015, situasi perekonomian global menunjukkan tren pelambatan, tak terkecuali Indonesia pun mengalami hal serupa. Pelambatan ekonomi itu tak pelak mempengaruhi pasar industri



otomotif. Walau demikian, pemerintah tetap meyakini peluang pasar dan investasi industri otomotif di Indonesia tetap terbuka. Hal ini ditandai dengan ekspansi dan investasi baru di sektor otomotif meskipun nilainya tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya (Kompas, 31/08/2015).

Menuru Kepala Subdit Industri Komponen pada Direktorat Industri Alat Transportasi Darat Kementerian Perindustrian Yan S. Tandiele, perkembangan industri otomotif di tanah air cukup baik. Di antara negara anggota ASEAN, Indonesia telah menduduki peringkat kedua setelah Thailand dalam hal jumlah produk otomotif yang dihasilkan. Selama tiga tahun terakhir angka produk kendaraan roda empat per-tahunnya rata-rata berkisar pada angka 1,2 juta unit kendaraan, sementara Thailand sudah mencapai 2,5 juta unit.

Terkait dengan pengembangan industri otomotif, pemerintah – dalam hal ini Kementerian Perindustrian – telah memiliki peta jalan (*roadmap*) hingga tahun 2020. Dalam peta jalan itu, untuk tahun ini ditargetkan jumlah produksi sebesar 1,6 juta unit dan penjualan 1,2 juta unit. Sedangkan sampai tahun 2020 dipasang target produksi meningkat menjadi 2,6 juta unit dan penjualan sebanyak 1,7 juta unit, sedangkan selisihnya untuk diekspor.



Namun, pelambatan ekonomi tahun ini agaknya akan berpengaruh terhadap patokan target dari peta jalan tersebut. Hal ini dibenarkan oleh Yan S. Tandiele. Setengah bergurau, Yang berujar: “Yang tadinya berniat beli mobil, (saat ini) *mending* beli yang lain dulu.” Pelambatan ekonomi tersebut, menurut Yan, berakibat pada turunnya produksi kendaraan roda empat pada semester I tahun 2015 sebesar 16% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Walau demikian, “Kita optimis masih akan mencapai di atas satu jutaan produk kendaraan mobil untuk tahun 2015 ini,” ujar Yan ketika diwawancarai Majalah Pengawasan SOLUSI pertengahan Oktober lalu.

Menghadapi persaingan saat pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN akhir tahun 2015 ini, Kementerian Perindustrian berupaya memperkuat industri otomotif di tanah air. Ada empat point strategis yang akan dilakukan, pertama: mengimbangi kompetisi impor kendaraan, khususnya dari negara-negara di kawasan ASEAN. Pesaing utama adalah Thailand sebagai negara produsen otomotif terbesar, yang pada tahun 2014 telah mampu memproduksi 2,5 juta kendaraan dimana 50% hasil produksinya diekspor. Menteri Perindustrian Saleh Husin menyatakan tekad bahwa Indonesia harus mampu menyalip Thailand, ini mengingat industri kita mampu serta memiliki pasar ekspor dan domestik yang besar.



Point kedua adalah dengan mendorong investasi asing untuk masuk ke pengembangan pembuatan komponen guna memenuhi kebutuhan dalam negeri. Ini dimaksudkan dalam rangka mengurangi impor komponen. Bahkan, khusus untuk industri dari Jepang diminta untuk menjadikan Indonesia sebagai basis industrinya dengan menggandeng industri dalam negeri. Kemenperind akan berkoordinasi agar investasi asing ini tidak mematikan keberadaan industri yang sudah ada di dalam negeri.

Point ketiga, pemerintah akan mendorong kemandirian Indonesia di bidang industri otomotif melalui penguasaan teknologi dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk itu pemerintah akan membantu melalui kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan melalui regulasi-regulasi yang berpihak kepada industri otomotif nasional. Selanjutnya, point keempat adalah melalui pengembangan dan pengamanan pasar dalam negeri sebagai basis untuk mengembangkan industri otomotif yang mandiri dan berdaya saing global.

Terkait dengan regulasi, telah dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No 34 Tahun 2015 tanggal 20 Maret 2015. Melalui peraturan ini diharapkan dapat mendorong ekspor serta mengembangkan industri otomotif nasional.

Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa *impor completely knocked down* (CKD) untuk kondisi sudah dicat dan disambung (dilas) hanya boleh dilakukan maksimal 10.000 set per-tahun. Jika melebihi kuota, perakitan wajib ekspor mulai tahun ketiga. Selain itu, pabrik juga wajib menanamkan investasi baru untuk membuat fasilitas pengecatan dan pengelasan (*welding*) mulai tahun ketujuh setelah surat rekomendasi impor CKD diterima.

Regulasi baru ini juga mengatur soal impor kendaraan dalam kondisi terurai tak utuh *incompletely knock down* (IKD). Disebutkan, minimal impor terdiri dari dua jenis uraian barang boleh berasal dari beberapa negara impor. Untuk IKD dengan bodi telah disambung dan dicat, perakitan dibebaskan kewajiban yang sama seperti CKD.

### Program Pengembangan

Program pengembangan industri otomotif terus dijalankan secara simultan. Dalam kebijakan industri nasional, industri otomotif ditempatkan sebagai industri yang diprioritaskan pengembangannya. Dalam hal ini, industri otomotif Indonesia dituntut untuk melakukan inovasi dalam menciptakan kendaraan yang sesuai dengan kebutuhan pasar baik domestik maupun ekspor. Jika tidak, pasar dalam negeri bisa dibanjiri oleh produk-produk impor.



Beberapa program pengembangan industri otomotif yang dilakukan adalah; pertama, program kendaraan angkutan umum murah melalui penenaan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) 0 persen untuk angkutan komersial seperti pick-up, truck dan bus komersil. Dalam program kendaraan angkutan murah ini Kementerian Perindustrian bersama BPP Teknologi mendesain prototipe *platform* dan komponennya.

Program kedua yakni mobil penumpang hemat energi dan harga terjangkau buatan dalam negeri. Program ini bertujuan agar mampu bertahan dan memenangkan persaingan industri otomotif di era FTA ASEAN dan Asia Timur. Program ini telah membuahkan hasil dengan masuknya investasi baru pada lima industri mobil dan sekitar 100 industri komponen otomotif, serta industri bahan baku baja dan plastik. Program ketiga yakni pengembangan *low emission carbon* untuk mobil dalam negeri untuk semua kapasitas mesin *Internal Combustion Engine* (ICE).

Berkaitan dengan program pengembangan industri otomotif tersebut, salah satu di antaranya dengan memproduksi kendaraan yang namanya LCGC (*Low Cost Green Car*) atau kendaraan hemat energi dengan harga terjangkau yang telah dimulai sejak tahun 2013. Menurut Yan S. Tandiele, kehadiran kendaraan LCGC itu cukup mendorong industri otomotif nasional. Produksi LCGC saat ini mencapai 200.000 unit kendaraan, artinya sekitar 16% dari total produksi. Beberapa contoh jenis kendaraan LCGC seperti Toyota Agya, Daihatsu Ayla, Nissan Datsun Go, Honda Brio Satya.

Membaca arah pengembangan industri otomotif ke depan, tentu kita tetap berharap agar cita-cita untuk mampu membangun “mobil nasional” sebagaimana yang tercetus beberapa dekade silam, tetap terjaga dan terus diupayakan. (Edwardsyah Nurdin).



## Indonesia Masih Menarik untuk Berinvestasi di Industri Otomotif

*Dengan melihat jumlah penduduk Indonesia yang besar dan semakin meningkatnya pertumbuhan kalangan menengah ke atas, mengindikasikan pangsa pasar bagi industri otomotif masih menjanjikan. Untuk membahas berbagai hal seputar industri otomotif, redaksi Majalah Pengawasan SOLUSI pada pertengahan Oktober lalu telah mewawancarai Kepala Subdit Industri Komponen pada Direktorat Industri Alat Transportasi Darat Kementerian Perindustrian Yan S. Tandiele. Berikut petikannya:*

**Bagaimana perkembangan industri otomotif dua atau tiga tahun belakangan ini?**

Perkembangannya cukup baik. Di ASEAN kita sudah berhasil menjadi salah satu basis produksi industri otomotif. Indonesia telah menduduki peringkat kedua sesudah Thailand. Ini dilihat dari kemampuan industrinya. Tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2012, 2013 dan 2014, jumlah produk otomotif kita sudah mencapai 1,2 juta unit kendaraan roda empat per-tahun dan ada penanjakan produk.

Memang tahun ini ada penurunan, itu dikarenakan ada pelemahan ekonomi yang mempengaruhi daya beli sehingga industri ini juga terpengaruh. Yang tadinya berniat beli mobil, (saat ini) mending beli yang lain dulu. Pada semester I tahun 2015 penurunannya sekitar 16% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, tapi kita optimis masih akan mencapai di atas satu jutaan produk kendaraan mobil untuk tahun 2015 ini.

**Berapa besar target produksi kita?**

Kalau berdasarkan *road-map* yang kita susun, pada tahun 2020 produksi akan mencapai 2 juta dan 2030 mencapai 4 juta unit mobil. Pada tahun 2014 produksi 1,298 juta unit, dan tahun 2013 sebesar 1,2 juta unit.

Jika dibandingkan dengan Thailand, hasil produksi mereka sekarang sekitar 2,5 juta. Thailand itu setengah dari produksinya diekspor, sedangkan Indonesia ekspornya sekitar 200.000 unit mobil; artinya sekitar 16% yang diekspor, sedangkan Thailand sudah 50%. Itu artinya apa? Artinya, saat ini pasar dalam negeri Indonesia sudah hampir sama dengan Thailand, dan Indonesia berpotensi melebihi Thailand ke depan.

**Bagaimana dengan arah pengembangan industri otomotif kita ke depan?**

Kita ingin Indonesia menjadi *basis-product* otomotif di dunia. Maksudnya, dari hulu ke hilir semaksimal mungkin dilakukan di dalam negeri, mulai dari desain sampai ke produk jadi kita semua yang melakukannya. Cita-cita besarnya seperti ini. Nilai tambah yang tinggi harus diberikan bagi perekonomian nasional.

Kalau berbicara ke depannya, maka tidak hanya membidik pasar dalam negeri. Kita juga harus ekspor seperti di Thailand, supaya tambah besar kontribusi industri otomotif terhadap perekonomian nasional. Nah, untuk itu kendaraan yang kita produksi harus sesuai dengan kebutuhan pasar dunia.

Sekarang orientasi kita masih lebih besar ke pasar domestik, pasar ekspornya baru sekitar 16%, karena kendaraan-kendaraan yang kita produksi itu masih untuk kebutuhan lokal. Jadi, teknologinya pun masih untuk kebutuhan lokal.

Lihat saja, umumnya kendaraan yang kita produksi adalah kendaraan serba guna yang mampu menampung 7 orang penumpang. Ini karena menyesuaikan dengan karakteristik pengguna mobil di Indonesia, yang umumnya untuk keluarga besar. Kalau di pasar internasional, kebutuhannya adalah untuk keluarga kecil.

Di samping itu, mobil yang *trendy* di pasar dunia adalah mobil Sedan. Selain itu, teknologinya disesuaikan dengan kebutuhan energi, di mana energi fosil makin berkurang dan ada "*concern*" terhadap pencemaran lingkungan; sehingga mobil ke depan harus benar-benar ramah lingkungan.

**Terkait dengan hal itu, kendaraan ramah lingkungan sudah menjadi kebijakan pemerintah?**

Kita sudah mulai. Ke depan kita harus memproduksi lebih banyak kendaraan yang bisa diterima di pasar global, yaitu kendaraan hemat energi dan juga harus ramah lingkungan. Jadi antara energi yang efisien dengan ramah lingkungan bersinergi.

Indonesia sendiri sebetulnya sudah mulai, yang namanya LCGC (*Low Cost Green Car*) atau kendaraan hemat energi dengan harga terjangkau tersebut ada dalam program pengembangan industri otomotif kita. Tahun 2013 sudah kita luncurkan. Dengan adanya program LCGC itu cukup mendorong industri otomotif nasional. Produksi LCGC saat ini mencapai 200.000 unit kendaraan, artinya sekitar 16% dari total produksi.

Beberapa contoh dari kendaraan tersebut seperti Toyota Agya, Daihatsu Ayla, Nissan Datsun Go, Honda Brio Satya. Harga kendaraan-kendaraan tersebut terjangkau masyarakat, disamping itu ramah lingkungan dan hemat energi.

Pada sisi lain, kita juga harus mampu membuat mobil yang bisa diekspor. LCGC itu *kan* sudah bisa diekspor. Kira-kira lebih dari 10.000 kendaraan kita ekspor per-tahunnya.

**Apa langkah-langkah strategis untuk mewujudkan itu?**

Salah satu caranya adalah kita harus menjadi negara tujuan investasi. Ibarat orang, supaya datang ke kita maka kita harus menjadi gadis cantik. Kalau perlu kita lebih baik dibandingkan negara-negara lain.

Misalnya, soal infrastruktur, pelayanan perizinan, pemberian macam-macam insentif baik fiskal maupun non fiskal, penguatan technical service dan *research and development* dalam

negeri, dan lain-lain.

Setelah diciptakan "*playing field*" yang kondusif, maka pada saat yang bersamaan APM-APM didorong untuk memproduksi kendaraan global dan menginvestasikan komponen-komponen yang memiliki *value-added* tinggi di Indonesia.

**Tantangan dan kendala apa yang dihadapi industri otomotif di Indonesia?**

Tantangan utamanya adalah daya saing. Apalagi pada akhir Desember 2015 sudah akan diberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), di mana pada saat itu semuanya sudah terbuka. Kita harus melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh orang lain.

Selain itu, kita harus memperbaiki faktor-faktor yang mendorong iklim usaha, seperti investasi, infrastruktur, regulasi yang pro-industri. Di sisi lain kita juga harus melakukan perlindungan terhadap industri dalam negeri dengan cara menggalakkan rasa cinta terhadap produk Indonesia.

**Bentuk konkrit mencintai produk dalam negeri, bagaimana?**

Mencintai produk dalam negeri sejatinya berpihak pada penggunaan produksi dalam negeri. Kita harus membuat produk otomotif yang kualitasnya baik dengan melakukan berbagai inovasi supaya dicintai oleh pengguna. Sebagai contoh, di kawasan ASEAN pada akhir tahun 2015 akan dimulai perdagangan bebas ASEAN. Kendaraan pun akan diperdagangkan dengan bebas. Ini sudah kita antisipasi terlebih dahulu dengan menciptakan kendaraan LCGC, ini namanya inovasi. Sebelum pasar kita dibanjiri oleh produk sejenis dari luar, kita ciptakan juga kendaraan LCGC. Ini merupakan inovasi kebijakan. Syukur sekarang kita sudah mampu memproduksi sampai 200.000 kendaraan jenis tersebut per-tahunnya. Bayangkan, kalau kita tidak buat produk seperti itu, pasti akan dibanjiri oleh produk dari Thailand.

**Melihat kondisi ekonomi kita dewasa ini, apakah industri otomotif optimis?**

Kontribusi industri otomotif terhadap perekonomian nasional cukup tinggi. Apalagi

potensi pasar dalam negeri masih sangat prospektif ke depan. Jumlah penduduk kita terbesar keempat di dunia, di mana saat ini sekitar 260 juta jiwa, dengan kalangan yang berpenghasilan menengah ke atas semakin meningkat. Kalau kita ambil 10% saja, jumlahnya kan sudah mencapai 2,6 juta. Ini berarti sangat prospek bagi pasar industri otomotif. Belum lagi untuk ekspor. Saya yakin industri otomotif itu sangat prospek di Indonesia

Belum lagi industri otomotif memiliki keterkaitan dari hulu ke hilir yang sangat tinggi. Di sektor hulunya, keterkaitan dengan industri bahan baku, komponen/penunjang, sementara ke hilirnya berkaitan dengan perbengkelan, transportasi dan sebagainya. Menurut saya, Industri ini benar-benar menggerakkan roda perekonomian.

**Bagaimana minat investor terhadap industri otomotif?**

Menurut saya masih tinggi. Hal tersebut tercermin dalam beberapa bulan terakhir ini Menteri Perindustrian beberapa kali meresmikan pabrik-pabrik baru maupun perluasan. Kebanyakan pabrik otomotif. Artinya, Indonesia masih menarik untuk berinvestasi di industri otomotif.

**Bagaimana dengan komponen dalam negeri?**

Pasar komponen dalam negeri cukup besar, baik untuk kebutuhan APM maupun untuk "*after market*". Industri komponen (otomotif) dikelompokkan menjadi dua golongan besar, yaitu kelompok komponen yang berafiliasi dengan prinsipal dan komponen yang murni lokal. Memang yang terbesar yang berafiliasi dengan prinsipal. Yang murni lokal kontribusinya masih kecil. Ini juga suatu tantangan sendiri. Ke depan, yang lokal akan terus didorong supaya semakin berkembang dan bisa bekerjasama dengan prinsipal. Pak Menteri selalu melobi prinsipal supaya meningkatkan nilai tambah industrinya di Indonesia, dengan cara melibatkan industri lokal. Pak Menteri juga mengajak prinsipal memproduksi mobil untuk pasar global, jangan hanya pasar Indonesia saja. (*Edwardsyah Nurdin*)



## Mix Policy Dalam Industrialisasi

Oleh : Fauzi Aziz  
Mantan Inspektur Jenderal Kemenperin

Pemerintah telah bertekad bahwa postur struktur perekonomian nasional harus berubah dari sistem ekonomi berbasis konsumsi menuju sistem ekonomi berbasis produksi dan investasi. Lebih lanjut Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Indonesia harus meninggalkan ketergantungannya pada komoditas menuju industrialisasi dan hilirisasi. Industrialisasi diyakini akan menjadi kunci jawaban bagi ikhtiar untuk mengubah postur struktur perekonomian nasional di masa mendatang.

Periode duapuluh tahun ke depan adalah periode kunci untuk menjalankan industrialisasi pertanian dan pembangunan industri manufaktur di dalam negeri. Ini dimaksudkan untuk mencapai tahap peningkatan produksi dan produktivitas nasional sebagai mesin pertumbuhan ekonomi. Bank Pembangunan Asia dalam salah satu studinya pernah menyatakan bahwa tidak ada satu pun negara di Asia yang sanggup menjadi negara berpendapatan tinggi tanpa mencapai tahap industrialisasi.

Politik industri yang disampaikan oleh presiden telah mendapatkan legitimasi dengan terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2015 tentang “Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN)” untuk jangka waktu 20 tahun ke depan terhitung sejak tahun 2015 hingga tahun 2035. Secara substantif, kita sudah tahu arahnya kemana industrialisasi akan dilabuhkan selama kurun waktu tersebut. Sektor-sektor apa saja yang menjadi prioritasnya, dan bahkan target capaian yang bersifat kualitatif dan kuantitatif secara eksplisit sudah dinyatakan dalam dokumen RIPIN itu.

Dalam situasi yang sering dipengaruhi oleh *volatilitas* ekonomi, membangun industri di masa kini dan mendatang tidaklah mudah untuk merealisasikannya karena para investor memiliki banyak pilihan untuk menanamkan modalnya. Iklim investasi menjadi faktor utama yang akan menjadi pertimbangan untuk melakukan pilihan investasi di satu negara. Stabilitas politik dan keamanan, hukum, serta stabilitas ekonomi akan menjadi acuan utama. Kebijakan industri sebagai bagian dari “*primary policy*” tidak bisa berdiri sendiri. Industrialisasi harus berada dalam satu kerangka kebijakan *primary policy* yang lain, yakni kebijakan investasi dan kebijakan perdagangan. Dari sini nampak bahwa “*mix policy*” atau bauran kebijakan telah menjadi sebuah isu penting yang perlu disikapi secara cerdas dan rasional agar produk kebijakan yang dihasilkan mendapatkan respon positif oleh investor di bidang industri.

Kita tahu bahwa industrialisasi merupakan kegiatan bisnis yang dilaksanakan untuk meraih keuntungan dan untuk mendapatkan jaminan kepastian bahwa tingkat pengembalian investasinya akan kembali dalam waktu yang dapat diprediksikan. Pengembangan bisnis, pengembangan produk dan pengembangan pasar adalah obsesi dasar bagi para pelaku usaha, dan upaya ini biasanya akan direalisasikan setelah mereka melihat arah yang ditentukan di dalam kebijakan primer pemerintah yang terstruktur dalam satu kerangka kebijakan industri, investasi dan perdagangan.

Pemikiran yang pernah disampaikan bahwa “*Indonesian Incorporated*” menjadi tindakan kolaboratif antara pemerintah dan pelaku usaha sejatinya merupakan aksi koperatif yang sangat baik untuk

membangun kekuatan ekonomi bangsa dalam menghadapi persaingan global. Manajemen kebijakan menjadi penting untuk mengelola bauran kebijakan (*mix policy*) antara industri, investasi dan perdagangan yang koordinasinya dilaksanakan oleh kantor menko perekonomian, dan pada level yang bersifat politis strategis dipimpin langsung oleh presiden. Ini dimaksudkan agar politik industri yang telah dicanangkan presiden untuk melepaskan Indonesia dari ketergantungan terhadap komoditas menuju industrialisasi dan hilirisasi dapat segera direalisasikan, baik yang investasinya dilakukan oleh BUMN/BUMD maupun oleh swasta nasional/asing.

“*The state company turn*” adalah langkah penting yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan peran lebih besar kepada BUMN/BUMD sebagai pihak yang dapat diberikan kepercayaan untuk melakukan investasi di sektor industri strategis yang mengolah sumber daya alam strategis. Upaya ini perlu ditempuh mengingat pada lima tahun ke depan, yaitu periode 2015-2019, fokus pembangunan industri diarahkan pada upaya peningkatan nilai tambah sumber daya alam. Investasi langsung pemerintah di sektor ini sangat dibutuhkan karena *return on investment* relatif lama dan tingkat keuntungannya tidak terlalu besar. Ini merupakan kegiatan yang bersifat pionir dari pemerintah yang dipercayakan kepada BUMN/BUMD.

Bauran kebijakan memang penting dan mutlak untuk dilakukan karena industrialisasi di Indonesia dilihat dari perspektif ekonomi politik bersifat lintas sektor dan lintas wilayah. Bauran kebijakan juga diperlukan dalam rangka mewujudkan prinsip keseimbangan kemajuan ekonomi dalam bingkai kesatuan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan. Bauran kebijakan tersebut diharapkan tidak hanya terjadi dalam kebijakan primer pemerintah saja, tetapi harus juga dapat direalisasikan dalam bauran kebijakan antara pusat dan daerah. Ini dimaksudkan agar tidak terjadi fragmentasi yang akan berujung pada

terjadinya in-efisiensi.

Industrialisasi tidak hanya memerlukan bauran kebijakan, tetapi juga membutuhkan adanya harmonisasi kebijakan dan regulasi, baik yang dilakukan di pusat maupun di daerah. Penyediaan infrastruktur untuk mendukung industrialisasi juga memerlukan harmonisasi dalam perencanaan dan pelaksanaannya, karena sekali terjadi ketidaksinkronan akan mengakibatkan muncul biaya ekonomi yang disebabkan sistem logistiknya tidak terjadi konektivitas.

Maka menjadi beralasan ketika presiden menggarisbawahi bahwa kawasan-kawasan industri yang dibangun di pusat-pusat wilayah pertumbuhan industri harus terintegrasi dengan sumber daya ekonomi yang terkait, khususnya sumber energi. Maksudnya berarti bahwa industrialisasi dan hilirisasi harus berjalan dalam koridor lingkungan ekonomi yang terintegrasi untuk menghasilkan tingkat efisiensi yang optimal karena produk yang dihasilkan harus berdaya saing, baik di pasar dalam negeri maupun di pasar regional dan global.

“Komersialisasi” RIPIN dan Kebijakan Industri Nasional (KIN) menjadi tugas berat bagi pemerintah karena para investor selalu mencermati dan mendalami setiap produk kebijakan dan regulasi yang dibuat pemerintah. Investor akan bersikap *wait and see* untuk merealisasikan rencana investasinya sampai mendapatkan kepastian bahwa iklim investasi kondusif atau sebaliknya. Pembentukan “Komite Industri Nasional” sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 3/2014 tentang Perindustrian menjadi bersifat mendesak. Melalui forum komite tersebut diharapkan berbagai bauran kebijakan dan bahkan program dapat dirumuskan agar industrialisasi dan hilirisasi dapat segera direalisasikan sesuai target, yakni pada akhir tahun 2015 sektor industri diharapkan tumbuh 6,8%, dan pada tahun 2020 diproyeksikan pertumbuhannya mencapai lebih dari 8%.

# Peranan Agama Menuju Efektivitas dalam Pelaksanaan Tugas

Oleh : Ali Joto Manalu  
Auditor Madya pada Inspektorat IV - Inspektorat Jenderal Kemenperin

Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kebaikan-kebaikan atau mengarahkan seseorang untuk berbuat baik, sesuai ketentuan yang berlaku pada masing-masing agama. Di antara ajaran kebaikan tersebut adalah mendukung pencapaian produktivitas kerja dalam setiap kegiatan dan diharapkan kemudian membuahkan hasil yang bermuara pada keefisienan dan keefektifan dalam setiap pekerjaan, baik individu maupun kelompok.

Di Indonesia agama-agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah adalah Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Khonghucu. Setiap agama mempunyai karakteristik dan metode masing-masing dalam melaksanakan/mencapai kebaikan dan kesejahteraan umatnya. Namun seringkali umat dari agama tersebut tidak mengetahui atau tidak mau tahu bahwa ajaran berbuat baik itu ada dalam ajaran agama. Maka di sinilah peranan pimpinan atau tokoh-tokoh agama untuk membimbing dan mengarahkan umatnya agar melakukan hal-hal yang baik dalam kerangka melaksanakan tugas-tugas secara efektif sehingga memberikan manfaat bagi institusi tempatnya bekerja dan masyarakat luas pada umumnya.

## Peranan Agama

Seorang motivator terkenal asal Amerika Serikat – Les Brown – mengatakan: “Anda tidak perlu menunggu berhasil untuk melakukan sesuatu, sebab anda tidak berhasil jika anda tidak memulai melakukan sesuatu”. Pernyataan itu mengandung makna bahwa untuk mencapai sesuatu yang diinginkan maka kita harus memulai dari sekarang. Demikian pula untuk mencapai efektivitas dalam

melaksanakan suatu tugas pekerjaan, kita harus memulainya dengan kesungguhan hati.

Dalam bidang pemerintahan sebenarnya telah banyak ketentuan-ketentuan yang mengatur bagaimana seorang pegawai/unit kerja melaksanakan tugas dan kewajibannya. Misalnya, dalam Perpres No. 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, bagaimana seharusnya pengadaan dilakukan secara efisien, efektif dan akuntabel. Demikian Juga dalam pengelolaan keuangan negara, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 3 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003 tertulis bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.” Artinya pengelolaan keuangan dengan baik/tertib berarti telah dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan/pertanggungjawaban.

Namun dalam praktiknya sering kali pegawai kurang melaksanakan atau bahkan tidak mengindahkan ketentuan peraturan yang berlaku, bahkan cenderung “merekayasa” agar memperoleh manfaat tertentu. Dalam kondisi demikian, agaknya kita perlu memahami bahwa agama pada hakekatnya memberikan peran untuk membentuk perilaku seseorang untuk berlaku baik untuk mewujudkan efektivitas dalam melaksanakan tugas pekerjaan. Melalui penghayatan yang mendalam terhadap nilai keagamaan, seorang seharusnya melaksanakan suatu kegiatan sebagai suatu panggilan/ibadah.



Ajaran agama yang terkait dengan kewajiban berbuat kebaikan dalam melaksanakan pekerjaan secara efektif pada agama Islam, misalnya, diantaranya terdapat dalam QS. Al-Dzariyat: 56; yang menyatakan “Kerja adalah ibadah dan sebagai realisasi dari tugas kekhalifahan”. Sementara QS al-An’am:165 menyatakan bahwa Allah akan menguji pemberianNya dan bagaimana manusia mensyukuri dan mempergunakan pemberian tersebut. Pada bagian lain, Allah SWT juga akan memberikan berkah (*reward*) bagi manusia yang berbuat kebajikan, demikian pula sebaliknya akan diberikan hukuman (*punishment*) atau sanksi terhadap manusia karena perbuatan mereka sendiri yang merugikan. Hal ini tersirat dari QS. AL-A’raf:96 yang menyatakan: “Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertaqwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi; tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat kami) itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya”.

Di sini ditekankan agar manusia ciptaan-Nya bekerja dengan baik dan mempertanggungjawabkan pemberian Allah tersebut kepada seseorang, untuk digunakan dengan sebaik-baiknya demi kemaslahatan bersama.

Lalu bagaimana dengan tuntunan dari ajaran Kristiani? Pada dasarnya serupa juga. Dalam Alkitab beberapa ayat sebagai tuntunan dalam bekerja dengan baik telah difirmankan, diantaranya dalam Efesus 5 : 16 -17 yang berbunyi : “Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat, Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sementara dalam Kejadian 4: 7 dinyatakan: “Apakah mukamu tidak akan berseri, jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu; ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya”. Dalam Matius 5 : 16 dikatakan: “Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga.”

Dalam Etika Protestantisme (Teori Max Weber dan Calvin) juga disebutkan “Dunia tempat berkarya; manusia perlu kerja keras untuk keuntungan ekonomi.”

Jadi jelas di sini bahwa orang sebagai pribadi/kelompok harus mempergunakan waktunya dengan baik, untuk kebaikan, dalam arti luas. Namun seringkali orang/kelompok dalam melaksanakan tugasnya tergoda untuk

tidak melaksanakan tugasnya dengan efisien dan efektif. Kepentingan pribadi, kebutuhan yang menuntut dan adanya kesempatan sering membuat orang melupakan ajaran agamanya dalam berbuat baik dalam mencapai efisiensi dan efektivitas dari suatu pekerjaan.

Agama-agama lain seperti ajaran Hindu dan Budha juga mengajarkan agar manusia dalam kehidupan sehari-harinya bekerja dengan baik. Agama Hindu misalnya, menekankan agar manusia sebagai ciptaan Tuhan tidak menyebabkan penderitaan bagi makhluk lain, melainkan mengusahakan keselamatan semua makhluk hidup. Dengan kata lain berbuat yang baik untuk keseimbangan dan kelestarian lingkungan secara keseluruhan. Demikian pula dengan agama Budha yang mengajarkan agar manusia tidak melakukan segala bentuk kejahatan; senantiasa mengembangkan kebajikan; dan membersihkan pikiran. Dalam Dhammapada Bab VI. 9 (84), disebutkan "seseorang yang arif tidak berbuat jahat demi kepentingannya sendiri ataupun orang lain, demikian pula ia tidak mengiginkan anak, kekayaan, pangkat atau keberhasilan dengan cara yang tidak benar. Orang seperti itulah yang sebenarnya luhur, bijaksana dan berbudi. Dalam Agama Budha juga diajarkan bahwa manusia ciptaan Tuhan itu harus berbuat baik, tidak berbuat curang dengan berbagi cara untuk kepentingan diri sendiri.

### Pekerjaan adalah Amanah

Dari uraian di atas jelas bahwa semua agama menekankan agar manusia itu berbuat baik dalam pengertian yang lebih spesifik: melakukan sesuatu dengan efisien dan efektif untuk kemaslahatan manusia baik sebagai individu, kelompok serta lingkungannya. Lalu menjadi pertanyaan mengapa orang/kelompok masih ada yang berusaha untuk berbuat atau melakukan kegiatan yang tidak efisien? Atau sejak dari awal perencanaan sudah ada niat mengarahkan suatu untuk tidak efisien, dalam arti misalnya membuat anggaran yang tidak perlu atau berlebih agar memperoleh "manfaat" dari kegiatan tersebut. Di sinilah perlunya pemimpin agama agar selalu mengingatkan dan menanamkan nilai-nilai luhur kepada umatnya untuk berbuat baik dalam melaksanakan tugasnya. Karena pekerjaan/tugas adalah amanah yang memberikan manfaat kepada semua dan merupakan pertanggungjawaban kita kepada Tuhan tentang bagaimana kita melaksanakan tugas di dunia ini.

Dalam hal ini adalah menarik gambaran yang disampaikan Abdul Mujib, Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2009), yang menggambarkan bagaimana seharusnya kerangka berfikir dan bekerja seorang aparatur negara dalam melakukan tugasnya dengan amanah dan kerja dengan ibadah sebagai berikut:

**“ Kesuksesan merupakan kondisi pikiran yang dihasilkan langsung oleh kepuasan diri, karena Anda mengetahui telah berbuat yang terbaik untuk menjadi sosok yang paling optimal dari kemampuan Anda. ”**

*(John Wooden)*



Melalui kerangka berfikir tersebut seorang aparatur negara yang mempunyai Nilai Dasar Kerja Amanah dan Ibadah, atau dorongan dari dalam diri untuk berkarya dan bekerja dengan ketulusan hati, ikhlas dan beramal. Dia akan mengerahkan segenap kemampuan, dalam rangka beribadah kepada Tuhan, demi mewujudkan kemaslahatan dan kemakmuran bangsa dan negara, tentunya sesuai dengan peraturan dan kaidah-kaidah yang berlaku.

### Kesimpulan

Memperhatikan ajaran-ajaran agama tentang bagaimana manusia dapat memberikan sumbangsuhnya berupa efektivitas dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya, dapat disimpulkan hal-hal pokok sebagai berikut: Pertama; pada

dasarnya semua agama mengajarkan agar umatnya melaksanakan tugas dengan baik, dengan demikian dapat tercipta keefisienan dan keefektifan dalam pelaksanaan tugas masing-masing individu, sehingga bermanfaat baik bagi diri sendiri, kemudian bagi kelompok dan pada akhirnya bagi bangsa dan negara.

Kedua; orang yang mempunyai nilai-nilai bahwa pekerjaan adalah amanah dan ibadah akan berkerja dengan tulus-ikhlas dan bekerja dengan sebaik-baiknya. Ketiga; kita sebagai Aparatur Sipil negara hendaknya mulai merenung dengan bertanya: apakah saya telah bekerja dengan baik, efektif dan efisien sesuai dengan ajaran dari agama kita masing-masing? Jika belum, saatnya kita mulai dari sekarang.





## BDI Surabaya: Mencetak SDM Industri Elektronika, Telematika dan Produk Tekstil

Dunia industri membutuhkan pekerja. Dan pekerja atau sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan itu tentulah orang-orang yang cakap, trampil dan memiliki kompetensi dan produktivitas tinggi sesuai jenis pekerjaannya. Apalagi pada akhir tahun ini sudah akan dimulai pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN, suatu era di mana persaingan untuk memperoleh tenaga kerja yang berkualitas – termasuk tenaga kerja sektor industri – di negara-negara ASEAN akan semakin terbuka. Itulah salah satu alasan kenapa Kementerian Perindustrian sejak tahun 2013 lalu mulai melakukan reposisi peran terhadap unit-unit kerja Balai Diklat Industri (BDI), salah satu diantaranya adalah BDI Surabaya.

Ketika awak redaksi Majalah Pengawasan SOLUSI menyambangi BDI Surabaya, awal September lalu, kebetulan tengah berlangsung kegiatan pelatihan garmen. Ada dua kelas pelatihan saat itu, yaitu kelas Level 1 dan kelas Level 2, masing kelas berjumlah 80 siswa. Kelas Level 1 mendidik dan melatih siswa agar mahir dan terampil memotong dan menjahit bagian-bagian dari pakaian, seperti saku, kerah, lengan dan sebagainya. Sedangkan kelas Level 2 mendidik dan melatih siswa sampai mampu menghasilkan satu stel pakaian secara utuh.

Yang menarik dari kegiatan pelatihan ini adalah adanya upacara singkat setiap pelatihan akan dimulai. Para siswa berdiri di tempatnya masing-masing kemudian mengucapkan yel-yel “BDI Yes!”, dilanjutkan dengan menyanyi

lagu “Hymne BDI Surabaya” dan setelah itu mengucapkan “Janji Peserta Diklat”. Isi Janji Peserta itu diantaranya adalah, akan selalu taat, patuh, setia dan jujur; melaksanakan aturan dan perintah yang diberikan selama mengikuti segala kegiatan pelatihan dengan sungguh-sungguh; serta sanggup bekerja di perusahaan industri. Upacara singkat ini dimaksudkan agar para siswa benar-benar serius mengikuti pelatihan tersebut sehingga dapat memberikan hasil yang optimal untuk kepentingan para siswa itu sendiri.

### Three in One

Berlokasi di jalan Gayung Kebon Sari Dalam No. 12, BDI Surabaya memperoleh spesialisasi peran sebagai pelaksana pendidikan dan pelatihan bagi SDM Industri elektronika, telematika, dan tekstil. Spesialisasi peran tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 40 tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian tersebut maka terjadi perubahan

tugas dan fungsi dari BDI Surabaya. Jika sebelumnya BDI Surabaya dalam menjalankan fungsi pendidikan dan pelatihan (diklat) difokuskan bagi para aparatur pembina industri terkait dengan bidang kepemimpinan, fungsional dan bina usaha; maka saat ini fungsi diklat tersebut lebih difokuskan untuk mencetak calon pekerja atau SDM industri yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan, khususnya untuk industri elektronika, telematika dan produk tekstil.

Reposisi peran yang dilaksanakan oleh BDI Surabaya ternyata berjalan mulus. Pada tahun 2013 tercatat 400 siswa mengikuti diklat, kemudian meningkat menjadi menjadi 900 siswa pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 ini peserta diklat telah mencapai 960 orang. Sesuai dengan peran yang diembannya maka diklat yang diberikan berkisar pada industri elektronika, telematika dan produk tekstil, khususnya industri garmen. Peserta yang mengikuti diklat industri garmen dalam hal ini menempati posisi terbanyak.

Para peserta diklat umumnya anak-anak lulusan SLTA yang ingin segera bisa bekerja.





Untuk menjangkau mereka, BDI Surabaya menggunakan sistem “jempot bola”, dengan mencari tamatan SLTA yang berminat mencari kerja. Terkait hal ini, Kepala BDI Surabaya Yulius Sarjono Eddy menuturkan: “Kami sering ke daerah, menemui camat, kepala desa untuk mencari orang-orang tamatan SMA untuk ikut dalam pelatihan. Mereka murni pencari kerja. Setelah kami didik terus kami salurkan ke perusahaan yang membutuhkan.”

Lebih lanjut Yulius menjelaskan: “Saat ini di BDI itu ada namanya *“three in one”*, yaitu pelatihan, sertifikasi dan penempatan.” Tentang konsep *“three in one”* ini, Yulius yang didampingi Kasubag Tata Usaha Retna Erry Triana dan Kasi Program dan Kerjasama Diklat Surya Agusman dengan antusias menjelaskan panjang lebar. Pelatihan dilakukan melalui pendidikan sesuai bidangnya, misalnya, pelatihan garmen masa pelatihan selama 21 hari. Semua fasilitas, mulai dari penginapan, konsumsi sampai fasilitas pelatihan disediakan dan ditanggung oleh BDI Surabaya. Mereka dididik dan dilatih mulai dari tidak tahu apa-apa hingga menjadi tahu dan menghasilkan produk pakaian jadi.

Usai menjalani pelatihan, peserta pelatihan kemudian mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh Sertifikat Uji Kompetensi yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi

Profesi (BNSP) yang telah diakui secara nasional. Dalam hal ini BDI Surabaya telah memiliki Sertifikasi Level 2, artinya lulusan peserta diklat sudah mampu membuat pakaian jadi dengan standar *error* maksimal 5 kesalahan.

Setelah lulus dari ujian kompetensi, BDI Surabaya kemudian menyalurkan para peserta pelatihan tersebut kepada perusahaan industri yang membutuhkan. Dalam hal ini BDI Surabaya telah membuat MOU dengan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga-tenaga yang telah dilatih tersebut. Beberapa perusahaan yang telah menandatangani MOU untuk penempatan tenaga kerja hasil didikan BDI Surabaya diantaranya adalah PT. Pan Brothers, PT. Vinsa Mandiri Utama, PT. Yamaha Electronics Manufacturing Indonesia, dan beberapa perusahaan lainnya. Bahkan sampai-sampai BDI Surabaya kewalahan memenuhi permintaan dari perusahaan-perusahaan industri tersebut mengingat jumlah siswa yang dididik cukup terbatas. Yang menggembirakan, keberhasilan dalam menerapkan konsep *“three in one”* agaknya menarik minat Balai Latihan Kerja (BLK) Jawa Timur untuk mengadopsi dan menerapkan konsep tersebut.

Selain pelatihan untuk industri garmen, pelatihan lainnya adalah untuk industri elektronika dan telematika. Dalam tahun 2015 BDI Surabaya telah meluluskan 300 orang peserta pelatihan *sound system*. Pelatihan ini atas permintaan PT. Yamaha Electronics Manufacturing Indonesia dalam rangka merekrut tenaga operator elektronika-audio di perusahaan tersebut. Bahkan, untuk tahun 2016 mendatang perusahaan telah memesan kepada pihak BDI Surabaya untuk mendidik 500 orang lagi untuk direkrut. Dalam hal ini Kepala BDI Surabaya berkomentar: “Ini lebih enak, karena mereka yang merekrut, kemudian

dikirim ke kita untuk dididik.”

Walaupun telah melaksanakan reposisi peran, diklat bagi para aparaturnya tetap juga dilaksanakan oleh BDI Surabaya, tentu dalam porsi yang lebih kecil. “Sekitar 10% – 15%,” ujar Yulius. “Diklat bagi para aparaturnya terutama Diklat Sistem Industri,” ujarnya.

Di samping itu BDI Surabaya juga membuka kuliah D1 Teknik Tekstil bidang Pemintalan. Ini adalah kegiatan kerja sama dengan Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil (STTT), Bandung, lembaga pendidikan yang juga bernaung di bawah Kementerian Perindustrian. Dalam hal ini seluruh pembiayaan ditanggung oleh STTT, Bandung, namun pelaksanaannya – mulai dari penerimaan mahasiswa, fasilitas perkuliahan sampai ke penyaluran lulusan ke dunia kerja – dilakukan oleh BDI Surabaya. “Program D1 ini sudah berlangsung empat angkatan. Materi yang diberikan 40% teori dan 60% praktik magang di perusahaan industri tekstil. Dalam hal ini kami telah membuat MOU dengan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jawa Timur terkait dengan penyaluran lulusan program D1 tersebut.”

Untuk melaksanakan tugas dan kegiatannya, BDI Surabaya dilengkapi fasilitas yang memadai. Mulai dari ruang kelas, ruang penginapan, peralatan teknis seperti mesin jahit dan peralatan elektronik sampai ke tenaga pendidik/pelatih. Untuk materi yang bersifat *soft skill*, tenaga pendidik adalah para widyaiswara BDI Surabaya sendiri; sedangkan materi yang bersifat *hard skill* (teknis) diberikan oleh teknisi-teknisi dari perusahaan atau asosiasi industri terkait.

### Antusias Pelaku Industri

Sumbangsih yang diberikan oleh BDI Surabaya dalam mendidik dan melatih SDM industri ternyata mendapat sambutan positif dari kalangan pelaku

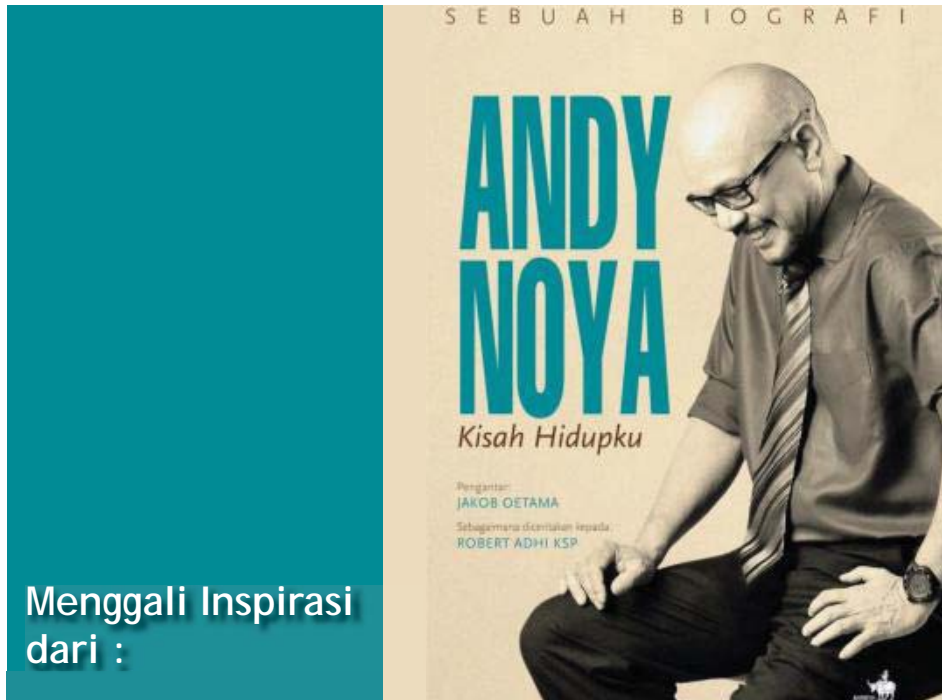
usaha industri, khususnya industri elektronika dan tekstil/garmen. Pada awal tahun 2015 saja PT. Pan Brothers, sebuah perusahaan garmen di Sragen, Jawa Tengah mengajukan permintaan untuk merekrut 1176 tenaga operator jahit lulusan BDI Surabaya, demikian pula PT. Dan Liris di Sukoharjo mengajukan tenaga serupa sebanyak 300 orang. Belum lagi beberapa perusahaan industri garmen lainnya banyak juga mengajukan hal serupa.

Sedangkan untuk tenaga operator elektronika permintaan datang dari PT. Yamaha Electronica, yang mengajukan kebutuhan tenaga kerja untuk tahun 2015 sebanyak 451 orang dan untuk tahun 2016 mendatang sebanyak 500 orang.

Permintaan yang membludak itu jelas memberikan gambaran bahwa para pelaku industri memberi apresiasi yang tinggi bagi SDM industri lulusan BDI Surabaya; dan itu merupakan gambaran positif terhadap kinerjanya. Namun hal ini sekaligus juga merupakan tantangan tersendiri yang harus dicarikan jalan keluar untuk menyikapinya. Untuk itu, sebuah harapan harus ditorehkan: jangan sampai pelanggan kecewa. (Edwardsyah Nurdin/Primertiningsih/Gusnaldi)







Menggal Inspirasi dari :

## Kisah Perjuangan Andy Noya

*Upaya pemerasan yang dilakukan wartawan tersebut, menurutku, tidak bisa dimaafkan. "Ini bukan kelalaian, tapi kejahatan," ujar ku.*

Kutipan di atas merupakan penggalan kisah saat Andy Noya memutuskan memecat seorang reporter. Reporter "anak emas" itu kedapatan mengirim surat kepada presiden direktur sebuah BUMN yang berisi permohonan wawancara untuk mengklarifikasi beberapa penyimpangan yang ia temukan di perusahaan. Surat dikirim tanpa sepengetahuan atasan, diketik pada kertas tanpa kop, ditandatangani dan dibubuhi informasi nomor telepon pribadi. Dalam rapat redaksi, perihal pemecatan menimbulkan pro-kontra. Surya Paloh sempat meminta Andy menganulir keputusan pemecatan dan memberi kesempatan reporter itu memperbaiki diri. Namun Andy Noya menolak. Baginya ada batas

yang jelas antara kelalaian dan kejahatan, dan ada prinsip yang harus ditegakkan dalam kasus ini.

Andy Flores Noya – lebih dikenal sebagai Andy Noya - lahir di Surabaya pada 6 November 1960. Biografi *Andy Noya Kisah Hidupku* yang ditulis Robert Adhi KSP berdasarkan wawancara ini, agaknya dapat memberi inspirasi berharga: kehidupan yang sulit bukan berarti kehidupan yang tidak bisa memberikan makna. Andy adalah anak manusia berbagai bangsa—dalam arti yang sebenarnya. Ia lahir dari ayah bernama Ade Wilhemus Flores Noya (mengalir darah Ternate, Perancis, Maluku, Portugis) dan ibu bernama Mady (mengalir darah Belanda, Jawa, Ambon).

"Flores", dalam Bahasa Portugis, berarti bunga. Andy merupakan anak bungsu. Ia memiliki empat saudara, dua di antaranya merupakan anak ayahnya dari pernikahan terdahulu.

Saat belum genap setahun, Andy mengalami sakit yang tidak bisa dijelaskan oleh dokter manapun. Ia tak bisa makan dan hidup dengan bantuan infus. Seorang kerabat mengatakan pada kedua orangtuanya bahwa penyakitnya merupakan "kiriman" ilmu hitam dari teman kantor sang ayah. Untuk menghilangkan pengaruh ilmu hitam tersebut, mereka harus meninggalkan tanah Jawa. Mereka sekeluarga akhirnya berlayar ke Ternate. Tiga tahun tinggal di sana, nenek Andy dari pihak ibu datang menjemput dari Makassar. Alasannya, Andy tak tahu persis. Ia menduga ada masalah antara ayah dan ibunya.

Kala itu kakek Andy yang bernama Jopie Risakotta Klaarwater adalah kepala penjara di Watampone, Sulawesi Selatan. Sementara nenek Andy yang bernama Yolanda Blouwer bekerja di sebuah toko buku. Tak lama setelah kejadian Gerakan 30 September 1965, Jopie dibunuh. Berdasarkan penuturan penduduk di sekitar penjara, kakek Andy dibunuh saat berusaha mempertahankan penjara dari serbuan sekelompok warga. Pasalnya, di dalam penjara itu terdapat 40 tahanan titipan dari Corps Polisi Militer (CPM) yang dituduh terlibat Partai Komunis Indonesia (PKI) dan tengah menunggu proses hukum. Jopie berkeras tidak mengizinkan massa masuk ke penjara dan tidak juga melepaskan tahanan. Massa yang kalap menjebol pintu penjara dan membacok sang kepala penjara. Nasib yang sama juga dialami wakil kepala penjara.

Setelah kematian Jopie pada November 1965, Yolanda memutuskan menjadi warga negara Belanda. Situasi politik yang membuat cemas ini juga menyebabkan banyak orang-orang Ambon eks tentara KNIL hijrah ke Belanda. Tiga anaknya ikut ke Belanda. Sementara Mady dan adiknya, Wynand, tetap di Indonesia. Mady dan

anak-anak lalu kembali ke Surabaya. Pindah dan menumpang pada rumah Yolanda yang saat itu ditempati bibinya dari pihak ibu, Mak In. Ayah Yolanda seorang Belanda tokoh bernama Jan Willem Blouwer, sementara Ibu Yolanda seorang Jawa bernama Sana Sapejah. Mak In adalah adik Sana Sapejah, buyut Andy.

Jangan bayangkan rumah yang ditempati Mak In adalah rumah milik Belanda yang bagus-bagus seperti dalam bayangan kita. Letaknya di gang sempit. Belakangan, karena rumah utama akan dikontrakkan ke orang, Mady dan Andy harus tinggal bersama dalam kamar berukuran 3x4 dengan Mak In. Dua kakak perempuan Andy, Gaby dan Yoke terpaksa harus dititipkan pada panti asuhan di daerah Kepanjen. Mady yang bekerja sebagai tenaga administrasi perusahaan *accu* mobil tak punya uang banyak.

Setelah dua tahun hidup dalam kondisi seperti itu, ibu Andy mendapat berita gembira. Yolanda mengirim uang dari Belanda agar mereka bisa mengontrak "rumah" di tempat lain. Ia juga berjanji mengirim uang secara rutin tiap bulan. Mereka pun pindah ke sebuah garasi 6x7 meter yang kemudian disulap sebagai rumah. Gaby kembali tinggal bersama mereka, sementara Yoke tinggal di asrama di Malang. Tak lagi bekerja di toko *accu* mobil, Mady mulai berusaha sebagai penjahit.

Ada sebuah pengalaman yang menoreh luka dalam sekali pada benak Andy. Waktu berusia 10 tahun, ia bersama seorang teman berboncengan sepeda hendak membeli layang-layang. Sekitar 300 meter dari rumah, tak disangka, roda sepeda mengenai kerikil dan oleng ke arah mobil yang tengah parkir. Gagang sepeda menghantam spion hingga patah. Sopir pemilik mobil melihat dan memelotot pada Andy. Andy lalu melarikan diri ke rumah, mengambil jalan memutar dengan maksud menghilangkan jejak. Namun, tak berapa lama temannya datang bersama pemilik mobil yang kemudian marah-marah pada sang ibu dan meminta ganti rugi. Nilainya setara dengan ongkos jahit sepuluh



baju. Ibunya mengaku tidak sanggup dan akan mengangsur setiap minggu hingga lunas. Sejak saat itu, sopir pemilik mobil datang setiap akhir pekan untuk mengambil angsuran ganti spion patah. Andy merasa orang kaya pasti jahat. Bibit kebencian yang tumbuh di benak Andy mendapat penyaluran. Ia tergabung dalam geng anak-anak berandalan yang sering mencuri apa saja. Mulai dari mangga, pisang, sepeda dari rumah-rumah orang kaya. Apa saja.

Kemiskinan masih melempar-lempar Andy dan keluarga ke mana saja. Berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Suatu masa mereka pindah ke Malang. Andy melanjutkan sekolah di SD Sang Timur. Di sekolah itu, ia mengenal seorang guru bernama Ana. Andy sempat diikutsertakan pada kompetisi antar sekolah. Sayangnya kalah. Dan saat mengakui kegagalannya, Bu Ana memeluk Andy dan mengatakan, “Kamu tidak usah bersedih. Kamu anak pandai. Kamu punya talenta dalam menulis. Kalau kamu kembangkan, suatu hari kamu bisa jadi wartawan,” kata Bu Ana. Kelak kata-kata itu yang terus memotivasi Andy hingga masuk Sekolah Tinggi Publisistik dan menjalani pekerjaan sebagai wartawan.

Namun tidak ada kisah hidup yang bisa dipersingkat. Setahun saja di Malang, Andy lalu berlayar ke Jayapura. Kota tempat ayahnya tinggal dan bekerja sebagai tukang memperbaiki mesin ketik. Andy belum lulus SD, namun mengaku

pada ayahnya sudah. Sang ayah memiliki kenalan guru dan bisa mendaftarkannya masuk Sekolah Teknik Negeri Jayapura—setingkat SMP. Setelah lulus dari ST Negeri Jayapura—tanpa punya ijazah SD, Andy melanjutkan sekolah di STM Negeri Jayapura. Pada masa itu Mady dan Gaby datang dan tinggal bersama Andy dan sang ayah.

Pada awal 1979, sang ayah meninggal mendadak. Hari itu Andy berniat menonton Sarung Tinju Emas di Gelanggang Olah Raga Cenderawasih. Namun saat ia pamit, sang ayah melarang pergi dan berkata, “Kamu di rumah saja. Jangan tinggalkan Mami sendirian.” Mereka terlibat perdebatan. Bagi Andy, ayahnya adalah sosok yang tak pernah melarang. Kali ini Andy kecewa dan marah. Sang ibu lalu membujuk ayah untuk mengalah. Pergilah Andy. Beberapa langkah meninggalkan teras, tiba-tiba Mady menjerit meminta tolong. Andy berlari dan melihat ayahnya sudah tersungkur di lantai. Napasnya tersengal-sengal. Andy memberi bantuan kardo pulmonari yang ia pelajari dari Pramuka. Namun tidak tertolong. Ayahnya meninggal di pangkuan Andy pada 16 Februari 1979.

Tak lama dari meninggalnya sang ayah, Andy kembali ke tanah Jawa, tepatnya ke Jakarta. Di ibukota, ia melanjutkan sekolah dengan bantuan biaya dari Yoke yang saat itu sudah menikah dengan seorang pelaut Pelni. Andy rencananya akan melanjutkan ke kelas 3 di STM

Boedi Oetomo, dekat Lapangan Banteng. Tapi lantaran kapal yang ditumpanginya terlambat, rencana itu batal. Slot bangkunya sudah diberikan kepada siswa lain. Ia lalu pindah ke STM 1 Budi Utomo kelas *filial* di Jalan Kramat—sekolah ini merupakan cikal bakal STM Negeri 6 Jakarta. Dan di ibukota ini Andy mengalami gear budaya. Ia baru tahu bahwa modus perkelahian antarsiswa tidak hanya dengan batu dan kayu seperti di Jayapura, tapi juga dengan air keras! Di kota ini juga ia pertama kalinya mengalami transaksi jual beli bocoran soal ujian sekolah dari guru. Bayarannya membuat ia geleng-geleng kepala: mulai dari 3 zak semen sampai 2 kaleng biskuit Kong Ghuana.

Lulus dari STM, ia mendapat beasiswa di IKIP Padang. Tapi ia tak ingin menjadi guru. Kata-kata Bu Ana tentang pekerjaan wartawan masih terngiang-ngiang dalam benaknya. Pada masa itu, lulusan STM tidak dibolehkan melanjutkan ke Sekolah Tinggi Publisistik (STP). Namun Andy tetap berkeras. Ditemani sang ibu, Andy “mengemis” pada Moeryanto Ginting, dosen STP yang mengurus pendaftaran mahasiswa baru. Gigihnya mereka dalam memohon, membuat hati sang dosen luluh lalu menghadap pada Rektor STP Ali Moechtar Hoeta Soehoet. Hasilnya boleh, tapi dengan syarat, jika nilai jelek ia tak boleh lanjut.

Walau Yoke mampu membiayai Andy untuk menyelesaikan STM, ia tidak janji terhadap STP. Pasalnya, gaji suami yang bekerja dengan lurus tidak bisa dikatakan besar. Maka Andy kuliah masih dengan uang yang pas-pasan. Berbagai cara ia lakukan, mulai dari mengirimkan artikel dan karikatur ke surat kabar hingga menjual kartu ucapan selamat hari raya. Honor tulisan berkisar 15.000 - 25.000 rupiah, sementara karikatur 5.000 - 15.000 rupiah. Kartu ucapan cukup 3.000 rupiah saja selembarnya. Perjuangan demi perjuangan dilakoninya demi meraih dunia jurnalistik.

Kehidupan Andy bergulir terus. Mulai dari terlibat menjadi reporter paruh waktu

untuk proyek buku *Apa & Siapa Orang Indonesia*. Penerbit buku itu adalah Grafitipers, penerbit majalah *Tempo*. Dari situlah pekerjaan sebagai wartawan ia mulai. Berbagai pernik kehidupan dunia jurnalisme ia alami di *Bisnis Indonesia*, *Matra*, hingga *Media Indonesia*.

Memulai karir di Media Indonesia, integritas pribadi seorang Andi Noya tampak menonjol. Dia berani memutuskan memecat reporter “anak emas” walau pemilik media kurang berkenan dan menimbulkan pro-kontra. Namun pemecatan tersebut bukan karena masalah pribadi, melainkan semata-mata karena yang bersangkutan dinilai telah melakukan pelanggaran. Buktinya, pada kesempatan lain Andy menolak “berkonspirasi” dengan cara menandatangani mosi tidak percaya untuk menjatuhkan seorang wartawan senior yang dinilai banyak melakukan penyimpangan. Penolakan Andy tersebut dikarenakan cara “berkonspirasi” yang dinilai tidak melalui proses dan mekanisme yang harus ditempuh untuk “mengadili” kesalahan atau kelalaian seseorang.

Sikap Andy yang memegang teguh integritas dalam melaksanakan pekerjaan memperoleh apresiasi positif dari Surya Paloh selaku pemilik sekaligus atasan di media tempatnya bekerja. Itu dibuktikan ketika Surya Paloh menolak niat Andy Noya untuk mengundurkan diri ketika ada yang berkonspirasi hendak mendongkelynya. Ketika itu Surya Paloh berujar dengan nada tinggi: “Saya tidak peduli apa yang mereka katakan tentang Andy Noya. Saya lebih percaya kamu.” Selanjutnya Surya Paloh memutuskan: “Kamu tetap memimpin *Media Indonesia*. Kalau gara-gara keputusan ini mereka keluar semua, silakan, tapi kamu tetap di sini.”

Sulit untuk tidak menitikkan air mata saat menyimak lembar demi lembar kisah Andy Noya—laki-laki yang kita lihat duduk di atas panggung “Kick Andy Show” untuk berbagi kisah dengan siapa saja yang miskin, lemah, dan tak berdaya; namun tak letih berjuang dan berbuat baik. (Trinanti Sulamit).

“Ketika Anda melakukan suatu yang gagal, maka kegagalan itu bukanlah kegagalan. Namun, yang pasti, kegagalan itu lebih berguna dari pada Anda tidak melakukan apa pun.”  
(George Bernard Shaw)



## Menekan Fraud Lewat Budaya Organisasi

Oleh : **Zaenal Arifin**

**Auditor Madya pada Inspektorat II  
Inspektorat Jenderal Kemenerperin**

Istilah “*fraud*” atau kecurangan sering kita dengar. Kata ini akrab di tengah masyarakat. Pertandingan sepak bola di Indonesia, misalnya, sering muncul sumpah serapah masyarakat akibat pertandingan yang curang untuk memenangkan salah satu *club* sepak bola. Di mana *score* pertandingan diatur sedemikian rupa, sehingga hasilnya sudah dapat diprediksi jauh sebelum pertandingan dimulai.

Artinya, pertandingan itu berlangsung tidak jujur. Ada kecurangan yang dilakukan pihak-pihak tertentu untuk memenangkan salah satu tim dalam sebuah pertandingan. Dan ternyata perilaku curang tidak hanya terjadi di

ini olah raga saja, tapi fenomena ini dapat terjadi mana saja, baik di sebuah organisasi atau lembaga apa pun.

*Fraud* dapat didefinisikan sebagai “suatu penyimpangan atau perbuatan melanggar hukum (*Illegal Act*) yang dilakukan dengan sengaja, untuk tujuan tertentu – misalnya menipu atau memberikan gambaran yang keliru (*mislead*) - untuk keuntungan pribadi/kelompok secara tidak *fair*, baik secara langsung maupun tidak langsung merugikan pihak lain”.

Boleh jadi tidak ada suatu organisasi/ lembaga yang bersih dari perilaku karyawan (dari

level pucuk pimpinan sampai karyawan bawahan) melakukan modus kecurangan (*fraud*). Pasalnya, permasalahan ini bersumber dan bermuara pada masalah manusia, “*the man behind the gun*”. Apa pun aturan dan prosedur diciptakan, sangat dipengaruhi oleh manusia yang memegang kuasa untuk menjalankannya, karena tidak semua orang jujur dan berintegritas tinggi.

Kecurangan bisa terjadi karena dipengaruhi tiga faktor pendorong, yaitu: motivasi, kesempatan, dan rasionalisasi atau pembenaran. Dari ketiga unsur tersebut yang dapat dikendalikan oleh suatu organisasi atau instansi hanya satu faktor, yaitu faktor kesempatan.

Perilaku *fraud* – dalam organisasi/ lembaga pemerintah – atau lembaga-lembaga yang bekerjasama dengan pemerintah dapat merugikan negara. Bila kerugian negara sudah jelas terbukti, maka modus itu dikatakan korupsi. Dan faktanya korupsi di Indonesia masih tinggi. Berdasarkan hasil survey terhadap 177 negara di dunia tentang Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dilakukan *Transparency International* tahun 2013, Indonesia mendapatkan skor IPK sebesar 32. Posisi Indonesia di kawasan ASEAN jauh dibandingkan Singapura (86), Brunei Darussalam (60), Malaysia (50), Philipina (36), dan Thailand (35). Secara peringkat dalam Corruption Perception Index (CPI) pada 2013, Indonesia menempati urutan ke 114 dari 177 negara di dunia.

Itu artinya tingkat korupsi di Indonesia masih sangat tinggi. Pada awal Desember 2014 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan hasil pemeriksaan semester I dan laporan hasil pemeriksaan I tahun 2014 kepada Presiden Joko Widodo. Dari hasil audit terhadap kementerian dan lembaga, BPK menemukan Rp. 30,8 triliun potensi kerugian negara. Sebanyak Rp. 25 triliun diantaranya berpotensi diproses hukum. BPK juga menemukan ketidakpatuhan lain. Setidaknya ada 2.802 kelemahan administrasi dan 62 kasus senilai Rp. 5,15 triliun. Temuan ini merupakan

aktivitas dari ketidakhematan, ketidakefisienan dan potensi kerugian negara.

Bukan tidak mungkin korupsi yang terjadi itu merupakan cermin *fraud* yang masih mewarnai aparat birokrasi dari mulai level atas sampai tingkat bawah. Boleh jadi fenomena itu merupakan indikasi bahwa *fraud* menyebar luas di lembaga kementerian maupun non-kementerian. Perilaku *fraud* sebetulnya dapat dicegah atau paling tidak meminimalisasi kecenderungan melakukan *fraud*.

Kegagalan dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan dapat diakibatkan oleh beberapa hal, seperti penyimpangan kebijakan dan penyimpangan yang diakibatkan oleh kecurangan. Penyimpangan kebijakan dilakukan oleh manajemen puncak terutama untuk mencapai tujuan tertentu, dengan cara membuat kebijakan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan penyimpangan yang diakibatkan oleh kecurangan (*fraud*) dapat dilakukan baik oleh manajemen puncak maupun pegawai lainnya untuk mendapatkan keuntungan, dengan cara melakukan tindakan-tindakan kriminal seperti korupsi, kolusi, penipuan, dan lain sebagainya.

Menurut Tuanakotta (2007:159) ada ungkapan yang secara mudah menjelaskan penyebab atau akar permasalahan dari *fraud*. Ungkapan itu adalah *fraud by need, by greed and by opportunity*. Ungkapan tersebut diartikan jika ingin mencegah *fraud*, hilangkan atau tekan sekecil mungkin penyebabnya (lihat buku *Fraud Auditing & Investigation*, oleh Diaz Priantara, Ak., SE., MSi., BKP., CPA., CRMA., CFE, penerbit Mitra Wacana Media).

Sementara itu Amrizal, Ak, MM, CFE, dalam tulisannya bertajuk Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan oleh Internal Auditor, sebagaimana dikutip dari buku *Fraud Auditing & Investigation*, menyatakan bahwa *fraud* sering terjadi apabila: pertama, pengendalian internal



tidak ada, lemah, dilakukan dengan longgar atau tidak efektif. Kedua, pegawai dipekerjakan tanpa memikirkan kejujuran dan integritas mereka. Ketiga, pegawai diatur, dieksploitasi dengan tidak baik, disalahgunakan atau ditempatkan dengan tekanan yang besar untuk mencapai sasaran dan tujuan keuangan. Keempat, model manajemen melakukan *fraud*, tidak efisien dan atau tidak efektif serta tidak taat pada hukum atau peraturan yang berlaku. Kelima, pegawai yang dipercaya memiliki masalah pribadi yang harus dipecahkan, masalah keuangan, masalah kesehatan keluarga, gaya hidup yang berlebihan. Keenam, industri di mana perusahaan beroperasi memiliki sejarah atau tradisi terjadinya *fraud*.

Oleh karena itu, langkah terbaik dalam meminimalisasi potensi *fraud* dalam suatu organisasi atau lembaga adalah melakukan tindakan pengawasan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pengawasan adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Pada pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa pengendalian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dilakukan untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

### Budaya Organisasi

Pengawasan intern tidak cukup dalam mengurangi perilaku *fraud* yang berpotensi merugikan negara. Buktinya, mesti telah ada sistem pengawasan intern, tapi korupsi masih terus terjadi. Artinya, masih dibutuhkan instrumen lain dalam meminimalisasi modus kecurangan di organisasi atau pun lembaga, baik pemerintah maupun swasta. Misalnya membangun budaya organisasi (*corporate culture*

atau pun *organization culture*).

The Jakarta Consulting Group mendefinisikan budaya organisasi sebagai “Nilai-nilai yang menjadi pegangan sumber daya manusia dalam menjalankan kewajibannya dan juga perilakunya di dalam organisasi”. Nilai-nilai inilah yang akan memberi jawaban apakah suatu tindakan benar atau salah; dan apakah suatu perilaku dianjurkan atau tidak. Nilai-nilai inilah yang berfungsi sebagai landasan untuk berperilaku (lihat buku: *A Strategic Management Approach: Corporate Culture, Organization Culture* oleh A.B. Susanto, F.X. Sujanto, Himawan Wijanarko, Patricia Susanto, Suwahjehadi Mertosono dan Wagiono Ismail, penerbit: The Jakarta Consulting Group).

Nilai-nilai yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau lembaga akan mempengaruhi keseluruhan aspek dari perusahaan atau tersebut, mulai dari apa yang harus diproduksi sampai dengan bagaimana seharusnya karyawan diperlakukan. Nilai-nilai bersama ini mempengaruhi kinerja dalam tiga cara. Pertama, manajer dan karyawan di seluruh organisasi yang memberikan perhatian luar biasa kepada hal-hal yang dianggap penting ditekankan dalam sistem nilai perusahaan/lembaga. Kedua, manajer rata-rata akan membuat keputusan yang lebih baik karena mereka dipandu oleh persepsi dari nilai-nilai bersama. Ketiga, orang-orang akan bekerja dengan sedikit lebih keras karena mereka memiliki dedikasi. Misalnya, mereka bersedia untuk bekerja melebihi jam kerja yang ditetapkan karena ada pelanggan yang sedang mengalami masalah, sedang mereka berprinsip untuk tidak meninggalkan pelanggan dengan masalah.

Bukanlah hal yang mustahil jika di lembaga pemerintah pun dapat menerapkan budaya perusahaan atau budaya organisasi seperti di perusahaan. Budaya ini yang harus ditanamkan di kalangan lembaga pemerintah. Memang menanamkan tata nilai di suatu organisasi tidak “semudah membalik telapak tangan”. Diperlukan proses atau waktu untuk membentuk tata nilai

sebagai satu budaya. Dimulai dari pimpinan tertinggi dengan menunjukkan perilaku budaya organisasi dan bukan tidak mungkin perilaku itu akan ditiru oleh bawahannya, sehingga pada akhirnya terbentuk budaya perusahaan atau organisasi.

Bila budaya tersebut telah terbentuk, maka perilaku kecurangan dalam suatu tatanan organisasi dapat ditekan seminim mungkin. Sebab, kerangka perilaku karyawan di suatu organisasi telah terbentuk dengan persepsi yang sama. Bila ada stimulus yang akan menjurus ke perilaku *fraud*, maka sensor persepsi terhadap nilai-nilai di luar budaya organisasi dengan sendirinya akan berjalan secara otomatis.

Tidak hanya itu, perlu juga diimplementasikan *Good Corporate Governance* (GCG) pada instansi pemerintah. Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) definisi *corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.

*Good Corporate Governance* (GCG) merupakan ruh atau spirit dari visi, misi dan *value* suatu perusahaan atau organisasi. Bahkan suatu

perusahaan dapat menyatakan secara jelas dan tegas dalam pernyataan visi dan misi mereka (lihat buku: GCG: *Strategy Execution with Balance Scorecard Approach*, oleh Wilson Arafat, penerbit: *Skyrocketing Publisher*).

Dengan menjalankan GCG akan memaksimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun secara internasional, serta dengan demikian menciptakan iklim yang mendukung investasi.

Dalam implementasi GCG, perilaku *fraud* semaksimal mungkin dihindarkan. Artinya untuk mewujudkan visi misi dari perusahaan atau lembaga, maka kerangka pelaksanaannya didasarkan pada prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil. Dengan cara demikian, pencapaian tujuan dilakukan tanpa cara-cara kecurangan.

Oleh karena itu, implementasi GCG tentunya berlandaskan pada budaya perusahaan atau lembaga. Jadi, bila perusahaan atau lembaga apa pun telah terbentuk budaya untuk menjalankan GCG – dan bukan sebagai formalitas – maka tindakan *fraud* atau kecurangan semaksimal mungkin dapat dihindari. Nah, sudahkah organisasi atau lembaga tempat Anda bekerja menerapkan itu?

“*Biarkan kekhawatiran Anda menjelma menjadi sumber kemajuan berpikir, gagasan baru, dan rencana baru.*”  
(*Sir Winston Churchill*)



## Pameran Produksi Indonesia 2015: Ajang Promosi Industri Dalam Negeri

Didampingi Gubernur Jawa Timur Soekarwo, anggota Komisi VI DPR RI Slamet Junaidi dan Bambang Haryo Soekartono, Wakil Ketua Kadin Bambang Sujagad dan Sekretaris Jenderal Kemenperin, Menteri Perindustrian Saleh Husin dengan mantap memukul gong tanda dibukanya dengan resmi Pameran Produksi Indonesia (PPI) 2015 yang diselenggarakan di Grand City Convention and Exhibition Hall, Surabaya. Sebelumnya, dalam pidato sambutannya Saleh Husin menjelaskan bahwa ajang pameran produk-produk industri merupakan salah satu strategi pemerintah untuk memperkuat industri nasional. Dan guna meraih hasil maksimal, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memprioritaskan produk industri yang memiliki kandungan lokal tinggi untuk dipamerkan.

Selesai membuka secara resmi PPI 2015, Menteri Perindustrian yang didampingi Gubernur Jawa Timur para pejabat terkait kemudian berkeliling di arena pameran,

melihat produk-produk yang dipamerkan serta berbincang dengan peserta pameran. Tengah harinya, di ruang berbeda diselenggarakan pula acara Forum Komunikasi Pimpinan Kemenperin dengan Dunia Usaha dan Instansi Terkait. Pada acara ini turut memberikan paparan Wakil Ketua Umum KADIN bidang Konstruksi dan Pertanahan Bambang Sujagad, yang memaparkan topik tentang pandangan KADIN terhadap kebijakan industri dan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri. Sedangkan Menteri Perindustrian Saleh Husin selaku *keynote speech* menyampaikan ulasan tentang pembangunan industri ke depan dan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri. Acara ini dihadiri para pejabat eselon I dan II Kemenperin serta para pelaku usaha industri lainnya.

### Tentang PPI

PPI 2015 kali ini diselenggarakan di Grand City Convention and Exhibition Hall,

Surabaya pada 6-9 Agustus 2015. Pameran ini merupakan bagian dari peringatan 70 Tahun Indonesia Merdeka. Tema yang diusung dalam pameran kali ini adalah "Bangga Menggunakan Produk Indonesia", sebuah tema yang layak diketengahkan di tengah persaingan global yang semakin sengit dewasa ini. Pameran dibuka untuk umum setiap harinya mulai pukul 10.00s/d 20.00 WIB. Sedangkan penyelenggara pameran adalah Pusat Komunikasi Publik Kemenperin.

Menempati areal seluas 4.441 meter persegi, PPI 2015 diikuti oleh 159 peserta dari berbagai jenis produk industri serta hasil riset unggulan dari satuan kerja di lingkungan Kemenperin. Kesemuanya dikategorikan ke dalam 13 kelompok, yaitu: kerajinan dan perhiasan; makanan; minuman; kosmetik dan herbal; tas, kulit dan alas kaki; garmen, tekstil dan tenun; furniture; industri aneka; alat transportasi dan pendukung, alat rumah tangga dan bangunan; alat mesin pertanian, alat kesehatan dan permesinan, elektronika dan telematika; serta Balai di lingkungan Kemenperin.

Pameran kali ini tergolong sukses. Hari pertama pameran jumlah pengunjung sebanyak 3.614 orang atau naik dibandingkan pada hari pertama PPI 2014 yang mencapai 2.692 orang. Para pengunjung pameran tidak hanya dari Surabaya dan sekitarnya saja. Menurut Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenperin Hartono, pengunjung pameran bahkan datang dari berbagai kota, seperti Jakarta, Banten, Bandung, Lampung, Semarang dan Bali. "Bahkan ada yang berasal dari luar negeri seperti Singapura dan Malaysia," ujar Hartono.

Sampai dengan penutupan, PPI 2015 diperkirakan dikunjungi lebih dari 20.000 orang. Antusiasme terhadap penyelenggaraan PPI 2015 tidak hanya terlihat dari jumlah pengunjung, melainkan juga dari komentar para peserta yang mengaku puas dan senang setelah dilibatkan dalam penyelenggaraan PPI 2015, karena selain dapat mempromosikan produk-produk unggulannya, juga mendapatkan tambahan pelanggan dan mitra bisnis baru.







Menurut Hartono, antusiasme pengunjung PPI 2015 dapat membuktikan masyarakat telah memiliki perhatian dan merasa bangga untuk menggunakan produk dalam negeri karena kualitasnya yang tidak kalah bersaing dengan produk impor.

Ketika berkeliling melihat-lihat stand yang memamerkan produk-produk unggulan industri dalam negeri, ingatan saya melayang pada pameran-pameran serupa yang telah diselenggarakan puluhan tahun lalu. Ketika itu penyelenggaraan PPI berskala nasional dan untuk pertama kalinya diselenggarakan di sekitar Monumen Nasional, Jakarta pada tahun 1985. Kemudian dilanjutkan pada tahun 1990, 1995, 1996 dan 2003. Setelah itu PPI skala nasional diselenggarakan di Pekan Raya Jakarta (PRJ)/JIExpo pada tahun 2006 dan 2009. Selanjutnya, karena keterbatasan anggaran dan untuk menjaga kesinambungan PPI yang

telah menjadi ikon Kementerian Perindustrian, maka PPI diselenggarakan berskala regional. Ini dimulai di Bandung pada tahun 2013 dan 2014. Kali ini penyelenggaraannya di Surabaya.

Pemilihan kota Surabaya sebagai ajang PPI 2015 bukan suatu kebetulan, melainkan mengingat Surabaya sebagai kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Di Surabaya dan kota-kota sekitarnya, industri kecil, menengah dan besar serta industri strategis tumbuh dan berkembang. Kota ini juga dikenal sebagai kota tujuan wisata, bisnis, pendidikan dan religi. Selain itu, kota Surabaya juga mudah dijangkau oleh peserta pameran yang berasal dari berbagai daerah.

Akhirnya, mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dalam ajang PPI berikutnya di tahun mendatang. (Edwardsyah Nurdin/Adhika Pradana).



Pengeras suara atau *loudspeaker* agaknya telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Dari mulai pesawat telepon/handphone sampai pesawat televisi pasti membutuhkan *loudspeaker*. Dari ruang rapat sampai kampanye pemilihan umum, pengeras suara telah menjadi kebutuhan yang tak terelakkan. Dan itu menjadi ladang empuk bidikan industri yang memproduksi *loudspeaker*.

Salah satu pelaku industri *loudspeaker* di tanah air adalah CV. Sinar Baja Electric (SBE). Kehadiran perusahaan ini dimulai pada tahun 1981 di Surabaya. Pada awal berdiri, produk pengeras suara yang dihasilkan lebih bersifat perakitan. Secara bergurau, Esa Lojal, *Local Marketing Manager* SBE Group sambil bergurau menyatakan: "Kita dulu dapat dikatakan hanya "tukang lem" saja." Tukang lem yang dimaksud tak lain adalah industri rakitan. "Dulu semua komponen kita impor, dan kita hanya merakitnya sampai menjadi produk *loudspeaker*," lanjut Esa.

Berlokasi di jalan Margomulyo No.5 – Tandes, Surabaya, usaha Sinar Baja Electric ternyata terus berkembang untuk memberikan solusi menyeluruh bagi produk-produk peralatan audio berkualitas suara yang tinggi (*high fidelity/hifi*) serta menjadi *supplier* komponen bagi banyak perusahaan *speaker* ternama di Jepang lebih dari 30 tahun terakhir. Di sisi lain, SBE juga telah berkembang dari sebuah pabrik tunggal untuk kemudian menjadi sebuah kesatuan dari lima pabrik, di mana masing-masing pabrik tersebut fokus pada area yang spesifik produk-produk *hifi*, *pro-sound*, dan *auto-sound*. Kelima pabrik tersebut areanya berada di Jawa Timur. Beberapa merk *sound-system* pun disandang perusahaan ini, seperti ACR, RHYME, SB Acoustic, Legacy dan lain-lain.

Keberhasilan perusahaan ini dalam mengembangkan usahanya agaknya tidak terlepas dari visi dan komitmen yang dipegang teguh oleh seluruh jajaran manajemennya. Visi yang ingin dicapai oleh Sinar Baja

Electric adalah menjadikan dirinya sebagai “Perusahaan Kelas Dunia” atau “*World Class Manufacturer*”, dengan dukungan dari sumber daya manusia yang selalu mengikuti perkembangan dunia. Oleh karena itu tidaklah berlebihan jika dikatakan SBE Group adalah salah satu produsen *loudspeaker* terbesar di Asia Tenggara.

Untuk itu, komitmen yang ditumbuhkan berupa kepuasan bagi segenap pemangku kepentingan, menjadi pemimpin pasar, terus mengembangkan teknologi terbaik bagi pasar internasional, menentukan harga yang tepat, serta menawarkan inovasi dan operasionalisasi memuaskan dengan tetap menjaga integritas perusahaan.

Dengan komitmen untuk terus menjaga kualitas produk, SBE Group telah memenuhi persyaratan akreditasi TS 16949/ISO 9001:2008. Dengan memenuhi standar internasional tersebut, SBE menegaskan bahwa kualitas produk, konsistensi, proses, dan kapasitas produksi yang dijalankan akan dikelola dan didokumentasikan dengan baik.

Kapasitas produksi yang dimiliki perusahaan mencapai 1,5 juta *piece* per-bulan, namun realisasi produk rata-rata per-bulan di kisaran angka 800 – 900 ribu *piece*. Jumlah itu disesuaikan dengan permintaan pasar dan untuk menjaga kualitas produk yang dihasilkan. Pemasaran produk tidak hanya berkuat pada pasar dalam negeri, bahkan telah menembus pasar luar negeri. Staf Marketing & Sales International SBE Group Ivan Adimulya Santoso menjelaskan, beberapa negara yang menjadi pasar dari produk yang dihasilkan SBE Group adalah Australia, Vietnam, Jepang, Jerman, Inggris, bahkan telah mencapai Kanada, Amerika Serikat dan sebagainya.

Pasar ekspor yang cukup luas itu tentu tak lepas dari persaingan menghadapi produk-produk sejenis, khususnya kompetitor dari China. Hal ini dibenarkan oleh Emilliani

Chandra, *Purchasing Manager* SBE Group. “Yang jelas, dalam hal persaingan hanya melawan kompetitor dari China kita memang agak berat, terutama dalam hal harga,” ujar Emilliani. “Tapi, kalau dari segi kualitas, kita tidak kalah bersaing. Makanya, kita fokus ke *high quality*,” lanjutnya.

Komitmen SBE Group kepada para pelanggannya tidak hanya sekedar *support* penjualan dan pemasangan (*assembly*). Selama bertahun-tahun perusahaan telah membangun Proses Manufaktur Vertikal Terintegrasi (*Vertical Integration Manufacturing*) untuk komponen-komponen yang penting. Dengan memproduksi komponen-komponen penting secara *in-house*, maka perusahaan mampu melakukan perbaikan dalam sisi kualitas, biaya, serta pengiriman produk-produknya. Selain itu, melalui proses secara *in-house* itu pula maka dapat diperoleh pengetahuan mendalam tentang teknologi *loudspeaker*.

Integrasi vertikal tersebut terdiri atas proses produksi *T-Yoke* (*bottom plate*) dan *upper plate* dan fasilitas pembuatan piringan timah dan *finishing*-nya; proses produksi *chassis* baja lengkap dengan proses pengecatan dan pelapisannya; proses melilitkan *Voice Coil*, termasuk di dalamnya pemasangan kabel datar (*flatwire*) dan kabel bundar (*round wire*); proses produksi dan pelapisan *cone*, *spider*, dan pelindung debu; proses injeksi plastik dan pengecoran; proses pengolahan kayu untuk dijadikan kabinet *speaker*, termasuk diantaranya proses pengecatan dan pelapisan; serta fasilitas permesinan, terutama digunakan untuk memproduksi *tool-die*, *jigs*, dan cetakan.

Di samping itu, untuk terus melanjutkan komitmen bagi kepuasan pelanggan, dan agar tetap unggul dalam *trend* teknologi terbaru, pada tahun 2009 SBE Group mendirikan Danesian Audio Aps. yang berlokasi di Denmark. Danesian Audio ini sebelumnya lebih dikenal dengan nama Scandinavian Audio



Research A/S, yang terkenal dengan insinyur-insinyurnya yang berbakat di bidang akustik maupun mekanik. Mereka juga terkenal akan kemajuan teknologi transdusernya. Transduser adalah suatu alat yang dapat mengubah suatu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Dalam hal ini energi listrik diubah ke dalam bentuk suara. Dalam hal ini SBE Group telah mematenkan beberapa teknologi transduser. Ini juga merupakan upaya perusahaan untuk memenuhi komitmen tersebut.

SBE Group agaknya tidak main-main dalam hal peningkatan kualitas hasil produksinya. Perusahaan juga memiliki fasilitas untuk itu, di bawah naungan Departemen Riset dan Pengembangan (*Research and Development/RND*). Di sini pengujian terhadap presisi terus dilakukan untuk memastikan terpenuhinya toleransi yang diinginkan dalam setiap *batch* produksi. Data dari pengujian ini bisa didapatkan oleh pelanggan melalui departemen *quality control*. Bahkan pelanggan pun bisa menentukan pengujian yang diinginkan.

Beberapa peralatan pengujian yang disediakan oleh Departemen Riset dan Pengembangan diantaranya adalah *Soundcheck Listen Inc*, *Neutrik Test Instrument*,

*DAAS pro*, *AudioMatic's-Clio*, *Linear Measurement System*, *Fine QC by Loudsoft*, *Audio Precision*, dan *Suspension Compliance*. Dan untuk terus meningkatkan kualitas akustik dan teknis dari transduser yang diproduksi, Departemen Riset dan Pengembangan juga menggunakan beberapa piranti lunak, antara lain *Klippel*, *Solidwork*, *Fine Cone*, *Fine Motor and Fine Box by Loudsoft*, *Leap by Linear X*, *Bass Box Pro*, *Smart Live*, dan *Femn Motor Simulation*.

Gerak langkah perusahaan tentu saja tidak selalu mulus. Beberapa permasalahan pasti selalu ada. Esa Lojal mengungkapkan, salah satu permasalahan adalah kepastian hukum tentang upah minimum regional (UMR). Jangan sampai UMR setiap tahunnya naik. Kalau dibiarkan saja tiap tahun naik, berat bagi perusahaan ini untuk terus beroperasi. Oleh karena itu diharapkan agar pemerintah jangan terlalu mendengar tuntutan LSM yang tidak jelas untuk menaikkan UMR tanpa mempertimbangkan kepentingan operasional perusahaan industri.

Masalah lainnya adalah beberapa bahan baku yang masih diimpor, seperti plat besi, kain dan plastik. Menurut Emilliani, impor itu terpaksa dilakukan karena belum



ada pasokan di dalam negeri. Padahal dengan impor maka komponen biaya lebih tinggi karena ada bea masuknya, ada anti dumpingnya, dan lain-lain.

Demikian pula dengan fasilitas infrastruktur di dalam negeri, baik darat maupun laut. Dengan blak-blakan Esa memaparkan contoh: "Kalau kita mengirim barang ke Medan, misalnya, biayanya bisa sampai Rp 15 juta/kontainer, sedangkan material kita yang datang itu *split-cost*-nya saja nilainya hanya sampai Rp 5 – 6 juta saja." Jadi, menurut Esa, biaya logistik itu mahal sekali dan akhirnya jadi tidak kompetitif.

Masalah lain, menurut Emiliani, adalah soal perizinan impor. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara produsen importir dengan importir umum. Kita diperlakukan sama, padahal seharusnya dibedakan. Kita mengimpor kan untuk kebutuhan produksi.

Produsen seperti kita kan menghidupi sampai dua ribu orang karyawan. Kalau impor bahan baku terhambat, produksi juga bisa terhambat dan itu pasti mengganggu produktivitas karyawan, mereka tidak bisa bekerja.

Terkait dengan upaya membangun kecintaan terhadap produk dalam negeri, Esa Lojal menuturkan: "Walau pun produk yang kita hasilkan telah merambah ke manca negara, namun bagaimana pun, visi dan misi dari pimpinan kami tetap berorientasi untuk mengisi kebutuhan pasar dalam negeri. Ekspor tetap dilakukan, tapi yang diutamakan tetap untuk mengisi pasar kebutuhan dalam negeri, karena menjadi tuan rumah di negeri sendiri merupakan cita-cita yang terus terpatri. Lebih baik menggunakan produk negeri sendiri, dari pada menggunakan produk luar negeri." Lagi pula, "Pasar dalam negeri masih terbuka luas," timpal Emiliani mengakhiri perbincangan kami. **(Edwardsyah Nurdin/Primertiningsih).**



Biro Keuangan Kemenperin menyelenggarakan Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2015. Acara yang berlangsung pada 16 - 18 September 2015 itu diselenggarakan di Hotel Royal Ambarukmo, Yogyakarta diikuti oleh satuan-satuan kerja di lingkungan Kemenperin Pusat maupun Daerah. Acara ini dimaksudkan sebagai sosialisasi upaya percepatan penyerapan anggaran (Primertiningsih).



Inspektorat Jenderal Kemenperin menyelenggarakan kegiatan Reviu RKA-K/L untuk anggaran tahun 2016 terhadap seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian, baik Pusat maupun Daerah secara serentak. Kegiatan berlangsung dari tanggal 19 s/d 23 Oktober 2015 bertempat di Hotel Puri Denpasar, Jakarta. Seluruh auditor dikerahkan untuk melakukan Reviu RKA-K/L tersebut. (Noa Salfhali).

# Sajak

Oleh : Subagio Sastrowardojo

Apakah arti sajak ini  
Kalau anak semalam batuk-batuk,  
bau vicks dan kayuputih  
melekat di kelambu.  
Kalau isteri terus mengeluh  
tentang kurang tidur, tentang  
gajiku yang tekor buat  
bayar dokter, bujang dan makan sehari.  
Kalau terbayang pantaloon  
sudah sebulan sobek tak terjahit.  
Apakah arti sajak ini  
Kalau saban malam aku lama terbangun:  
Hidup ini makin mengikat dan mengurung.  
Apakah arti sajak ini:  
Piaraan anggrek tricolor di rumah atau  
pelarian kecut ke hari akhir?

Ah, sajak ini  
mengingatkan aku kepada langit dan mega.  
Sajak ini mengingatkan kepada kisah dan keabadian.  
Sajak ini melupakan aku kepada pisau dan tali  
Sajak ini melupakan kepada bunuh diri.

*(Dikutip dari buku kumpulan puisi: SIMPHONI  
oleh Subagio Sastrowardojo)*

## GUNAKAN PRODUK DALAM NEGERI



## Kejayaan Untuk Indonesia





BANGUN INDONESIA



DENGAN PRODUK DALAM NEGERI



**MARI KITA MENCINTAI PRODUKSI DALAM NEGERI**  
*NEVER SAY MAYBE, MADE IN INDONESIA IS BETTER FOR US*